



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Dari : Sekretaris Disperakim Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 1 /KEU/I/2025
Tanggal : 06 Januari 2025
Perihal : Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024
Bulan Desember

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Desember.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa.

SEKRETARIS

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19731113 199803 1 003



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN DESEMBER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Desember pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Desember 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

1



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan Desember sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang,

Desember 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 63.375.080.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.002.588.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.372.492.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **“Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	63.375.080.000	62.366.955.709	98,41	1.008.124.291
5.1	BELANJA OPERASI	62.002.588.000	60.995.612.409	98,38	1.006.975.591
5.1.1	Belanja Pegawai	14.279.661.000	13.603.409.204	95,26	676.251.796
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.793.293.000	5.648.705.720	97,50	144.587.280
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.290.020.000	4.240.433.700	98,84	49.586.300
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.032.492.000	3.984.045.300	98,80	48.446.700
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	257.528.000	256.388.400	99,56	1.139.600
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	376.361.000	368.682.454	97,96	7.678.546
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	365.497.000	357.854.286	97,91	7.642.714
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.864.000	10.828.168	99,67	35.832
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	198.500.000	198.500.000	100	0
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	198.500.000	198.500.000	100	0
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.060.000	90.870.000	99,79	190.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	76.000.000	75.810.000	99,75	190.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.060.000	15.060.000	100	0
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	120.405.000	110.620.000	91,87	9.785.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	120.405.000	110.620.000	91,87	9.785.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	217.563.000	207.700.560	95,47	9.862.440
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	207.674.000	197.996.280	95,34	9.677.720
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.889.000	9.704.280	98,13	184.720
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	41.868.000	24.047.931	57,44	17.820.069
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.868.000	24.047.931	57,44	17.820.069
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	544.000	59.735	10,98	484.265
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	416.000	56.665	13,62	359.335
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	128.000	3.070	2,40	124.930
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	392.522.000	373.241.392	95,09	19.280.608
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	381.522.000	363.020.196	95,15	18.501.804
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.000.000	10.221.196	92,92	778.804
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	8.637.429	78,52	2.362.571
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.000.000	8.090.445	80,90	1.909.555
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.000.000	546.984	54,70	453.016
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	25.912.519	80,98	6.087.481

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.000.000	24.271.631	80,91	5.728.369
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.000.000	1.640.888	82,04	359.112
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.450.000	0	0	21.450.000
5.1.1.1.12.1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20.162.000	0	0	20.162.000
5.1.1.1.12.2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.288.000	0	0	1.288.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.044.788.000	7.516.943.484	93,44	527.844.516
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.044.788.000	7.516.943.484	93,44	527.844.516
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.044.788.000	7.516.943.484	93,44	527.844.516
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	441.580.000	437.760.000	99,13	3.820.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	441.580.000	437.760.000	99,13	3.820.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	408.940.000	407.840.000	99,73	1.100.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.640.000	29.920.000	91,67	2.720.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.522.592.000	17.192.369.571	98,12	330.222.429
5.1.2.1	Belanja Barang	4.359.939.000	4.341.255.193	99,57	18.683.807
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.359.939.000	4.341.255.193	99,57	18.683.807
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	299.900.500	99,97	99.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	6.800.000	100	0
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	274.800.000	274.311.700	99,82	488.300
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	383.722.000	381.103.585	99,32	2.618.415
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	348.745.000	348.088.000	99,81	657.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	23.610.000	100	0
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	50.000.000	100	0
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	11.200.000	11.200.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34.050.000	34.050.000	100	0
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.609.000	199.608.727	100	273
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.012.178.000	1.012.177.181	100	819
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.639.985.000	1.626.982.500	99,21	13.002.500
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	28.300.000	94,33	1.700.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	45.123.000	99,74	117.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.702.464.000	6.425.238.501	95,86	277.225.499
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.461.313.000	5.202.407.992	95,26	258.905.008
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	337.200.000	332.700.000	98,67	4.500.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000	6.750.000	100	0
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.349.090.000	3.329.820.000	99,42	19.270.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	76.620.000	100	0
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	154.620.000	100	0
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	5.100.000	66,67	2.550.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	272.733.000	272.733.000	100	0
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	547.910.000	547.910.000	100	0
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	34.200.000	100	0
5.1.2.2.1.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.000.000	16.000.000	100	0
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.415.000	32.800.000	92,62	2.615.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	46.672.133	38,97	73.102.867
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	8.774.100	43,87	11.225.900
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	300.619.759	69,11	134.380.241
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000	18.000.000	100	0
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	19.089.000	62,90	11.261.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.028.000	252.087.879	94,76	13.940.121
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	99.994.000	88.740.161	88,75	11.253.839
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.905.000	4.400.251	89,71	504.749
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.129.000	5.499.169	89,72	629.831
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	153.448.298	99	1.551.702
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	16.500.000	91,67	1.500.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	16.500.000	100	0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	85.990.000	84.690.000	98,49	1.300.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	85.990.000	84.690.000	98,49	1.300.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	463.900.000	463.894.530	100	5.470

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	240.554.000	240.551.430	100	2.570
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	38.282.000	38.281.125	100	875
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	185.064.000	185.061.975	100	2.025
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	368.043.000	366.493.100	99,58	1.549.900
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	158.513.000	158.512.400	100	600
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	209.530.000	207.980.700	99,26	1.549.300
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	698.650.000	686.716.971	98,29	11.933.029
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	448.650.000	436.716.971	97,34	11.933.029
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	16.500.000	100	0
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	39.700.000	100	0
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	258.650.000	246.716.971	95,39	11.933.029
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	20.000.000	100	0
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	43.800.000	100	0
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	70.000.000	100	0
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.743.539.000	5.721.158.906	99,61	22.380.094
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.493.539.000	5.471.158.906	99,59	22.380.094
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.493.539.000	5.471.158.906	99,59	22.380.094
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000	18.000.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000	18.000.000	100	0
5.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000	18.000.000	100	0
5.1.5	Belanja Hibah	1.450.335.000	1.449.833.634	99,97	501.366
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.450.335.000	1.449.833.634	99,97	501.366
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.450.335.000	1.449.833.634	99,97	501.366
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.450.335.000	1.449.833.634	99,97	501.366
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.750.000.000	28.750.000.000	100	0
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.750.000.000	28.750.000.000	100	0
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	28.750.000.000	28.750.000.000	100	0
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	28.750.000.000	28.750.000.000	100	0
5.2	BELANJA MODAL	1.372.492.000	1.371.343.300	99,92	1.148.700
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.202.036.000	1.201.340.800	99,94	695.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	359.936.000	359.240.800	99,81	695.200
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	359.936.000	359.240.800	99,81	695.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	223.936.000	223.288.000	99,71	648.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	493.800.000	493.800.000	100	0
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	493.800.000	493.800.000	100	0
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	493.800.000	493.800.000	100	0
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	348.300.000	348.300.000	100	0
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	313.300.000	313.300.000	100	0
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	313.300.000	313.300.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	169.007.000	168.553.500	99,73	453.500
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	169.007.000	168.553.500	99,73	453.500
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	169.007.000	168.553.500	99,73	453.500

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud- Software	169.007.000	168.553.500	99,73	453.500
	Jumlah Belanja	63.375.080.000	62.366.955.709	98,41	1.008.124.291
	Surplus/(Defisit)	0	(62.366.955.709)	100	62.366.955.709
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(62.366.955.709)	100	62.366.955.709

Semarang, 31 Desember 2024
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 63.375.080.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.002.588.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.372.492.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Perubahan Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.002.588.000,- dan realisasi sebesar Rp. 60.995.612.409,- dengan Presentasi 98.38 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 17.522.592.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.192.369.571,- dengan Presentasi 98.12 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 28.750.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.750.000.000,- dengan Presentasi 100 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal mengalokasikan sebesar Rp. 1.372.492.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.371.343.300,- dengan Presentasi 99.92 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.202.036.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.201.340.800,- dengan Presentasi 99.94%; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.449.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.449.000,- dengan Presentasi

100%; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 169.007.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 168.553.500,- dengan Presentasi 99.73 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD					
TAHUN ANGGARAN 2024					
SKPD	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Fungsi	:				
Sub Fungsi	:				
Provinsi	:	Jawa Tengah			
NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	63.375.080.000	61.513.163.391	1.006.770.609	97,06
L	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.882.584.000	20.900.571.316	982.012.684	95,51
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.112.957.000	1.092.024.135	20.932.865	98,12
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	642.957.000	631.848.525	11.108.475,00	98,27
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	470.000.000	460.175.610	9.824.390,00	97,91
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.460.021.000	13.782.507.688	677.513.312	95,31
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.838.081.000	13.165.649.204	672.431.796,00	95,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	531.240.000	526.696.784	4.543.216,00	99,14
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	49.780.000	220.000,00	99,56
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	25.481.000	219.000,00	99,15
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	9.956.000	44.000,00	99,56
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	177.841.298	2.158.702	98,80
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.393.000	607.000,00	93,93
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	153.448.298	1.551.702,00	99,00
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	-	100,00
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	182.947.600	2.292.400	98,76
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	45.123.000	117.000,00	99,74
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	29.599.600	400.400,00	98,67
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	29.350.000	650.000,00	97,83
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	49.975.000	25.000,00	99,95
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	19.200.000	800.000,00	96,00
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.700.000	300.000,00	97,00
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	2.363.949.000	2.329.786.584	34.162.416	98,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	50.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	75.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	299.900.500	99.500,00	99,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.999.800	200,00	100,00

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.449.000	19.449.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	28.300.000	1.700.000,00	94,33
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.145.000.000	1.133.412.480	11.587.520,00	98,99
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	99.500.000	98.860.000	640.000,00	99,36
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000.000	579.864.804	20.135.196,00	96,64
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.142.036.000	1.141.980.800	55.200	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	163.936.000	163.928.000	8.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	978.100.000	978.052.800	47.200,00	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.381.000	1.487.677.240	221.703.760	87,03
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	184.158.308	841.692,00	99,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	356.065.992	218.708.008,00	61,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	949.606.000	947.452.940	2.153.060,00	99,77
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	729.000.000	705.805.971	23.194.029	96,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	38.949.571	11.050.429,00	77,90
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.000.000	226.856.400	12.143.600,00	94,92
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	70.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	350.000.000	-	100,00
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.601.321.000	34.585.018.844	16.302.156	99,95
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	393.655.000	391.998.906	1.656.094	99,58
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	293.655.000	292.909.759	745.241,00	99,75
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	99.089.147	910.853,00	99,09
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	176.479.046	3.520.954	98,04
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	97.238.667	2.761.333,00	97,24
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	79.240.379	759.621,00	99,05
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	31.711.296.000	31.709.561.598	1.734.402	99,99
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.013.453.000	4.012.781.244	671.756,00	99,98
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.697.843.000	27.696.780.354	1.062.646,00	100,00
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.316.370.000	2.306.979.294	9.390.706	99,59
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.316.370.000	2.306.979.294	9.390.706,00	99,59
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.656.329.000	2.651.658.239	4.670.761	99,82
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	84.840.000	160.000	99,81
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	84.840.000	160.000,00	99,81

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.571.329.000	2.566.818.239	4.510.761	99,82
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	269.718.000	268.248.221	1.469.779,00	99,46
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	99.831.393	168.607,00	99,83
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.201.611.000	2.198.738.625	2.872.375,00	99,87
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.575.411.000	1.574.591.294	819.706	99,95
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.575.411.000	1.574.591.294	819.706	99,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.470.411.000	1.470.344.710	66.290,00	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	104.246.584	753.416,00	99,28
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	399.289.000	398.683.784	605.216	99,85
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	399.289.000	398.683.784	605.216	99,85
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	399.289.000	398.683.784	605.216,00	99,85
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	598.806.284	1.193.716	99,80
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	598.806.284	1.193.716	99,80
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	249.395.784	604.216,00	99,76
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	349.410.500	589.500,00	99,83
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	588.834.392	1.165.608	99,80
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	588.834.392	1.165.608	99,80
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	150.330.000	149.880.000	450.000,00	99,70
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	439.670.000	438.954.392	715.608,00	99,84
VIII.	PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	214.999.238	762	100,00
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	214.999.238	762	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	215.000.000	214.999.238	762,00	100,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	855.146.000	853.792.318	1.353.682	99,84
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	855.146.000	853.792.318	1.353.682	99,84
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	214.648.524	351.476,00	99,84
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	640.146.000	639.143.794	1.002.206,00	99,84
	JUMLAH	63.375.080.000	62.366.955.709	1.008.124.291	98,41



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN NOVEMBER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan November pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, November 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan November sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang,

November 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan.

Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 63.375.080.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.002.588.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.372.492.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **“Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 30 November 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	63.375.080.000	58.614.244.051	92,49	4.760.835.949
5.1	BELANJA OPERASI	62.002.588.000	57.366.807.251	92,52	4.635.780.749
5.1.1	Belanja Pegawai	14.279.661.000	12.595.150.808	88,20	1.684.510.192
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.793.293.000	5.250.848.268	90,64	542.444.732
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.290.020.000	3.948.955.000	92,05	341.065.000
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.032.492.000	3.721.054.200	92,28	311.437.800
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	257.528.000	227.900.800	88,50	29.627.200
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	376.361.000	342.559.696	91,02	33.801.304
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	365.497.000	333.205.184	91,16	32.291.816
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.864.000	9.354.512	86,11	1.509.488
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	198.500.000	184.630.000	93,01	13.870.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	198.500.000	184.630.000	93,01	13.870.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.060.000	82.945.000	91,09	8.115.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	76.000.000	70.395.000	92,63	5.605.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.060.000	12.550.000	83,33	2.510.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	120.405.000	103.250.000	85,75	17.155.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	120.405.000	103.250.000	85,75	17.155.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	217.563.000	193.071.720	88,74	24.491.280
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	207.674.000	184.526.160	88,85	23.147.840
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.889.000	8.545.560	86,41	1.343.440
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	41.868.000	19.858.529	47,43	22.009.471
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.868.000	19.858.529	47,43	22.009.471
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	544.000	55.182	10,14	488.818
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	416.000	52.451	12,61	363.549
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	128.000	2.731	2,13	125.269
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	392.522.000	343.730.951	87,57	48.791.049
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	381.522.000	334.808.604	87,76	46.713.396
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.000.000	8.922.347	81,11	2.077.653
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	7.947.994	72,25	3.052.006
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.000.000	7.469.383	74,69	2.530.617
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.000.000	478.611	47,86	521.389
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	23.844.196	74,51	8.155.804

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.000.000	22.408.419	74,69	7.591.581
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.000.000	1.435.777	71,79	564.223
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.450.000	0	0	21.450.000
5.1.1.1.12.1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20.162.000	0	0	20.162.000
5.1.1.1.12.2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.288.000	0	0	1.288.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.044.788.000	6.941.652.540	86,29	1.103.135.460
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.044.788.000	6.941.652.540	86,29	1.103.135.460
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.044.788.000	6.941.652.540	86,29	1.103.135.460
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	441.580.000	402.650.000	91,18	38.930.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	441.580.000	402.650.000	91,18	38.930.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	408.940.000	374.770.000	91,64	34.170.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.640.000	27.880.000	85,42	4.760.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.522.592.000	15.534.822.809	88,66	1.987.769.191
5.1.2.1	Belanja Barang	4.359.939.000	3.797.057.068	87,09	562.881.932
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.359.939.000	3.797.057.068	87,09	562.881.932
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	261.650.500	87,22	38.349.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	6.800.000	100	0
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	274.800.000	49.934.700	18,17	224.865.300
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	383.722.000	368.016.460	95,91	15.705.540
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	348.745.000	314.112.000	90,07	34.633.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	21.550.000	91,27	2.060.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	50.000.000	100	0
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	11.200.000	11.200.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34.050.000	34.050.000	100	0
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.609.000	199.608.727	100	273
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.012.178.000	1.012.177.181	100	819
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.639.985.000	1.440.407.500	87,83	199.577.500
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	27.550.000	91,83	2.450.000

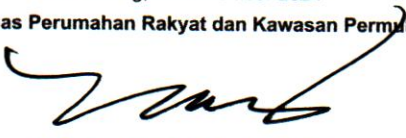
Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.702.464.000	5.867.582.550	87,54	834.881.450
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.461.313.000	4.765.703.324	87,26	695.609.676
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	337.200.000	297.300.000	88,17	39.900.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000	6.750.000	100	0
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.349.090.000	3.072.175.000	91,73	276.915.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	70.235.000	91,67	6.385.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	141.735.000	91,67	12.885.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	5.100.000	66,67	2.550.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	272.733.000	252.059.045	92,42	20.673.955
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	547.910.000	503.018.422	91,81	44.891.578
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	31.350.000	91,67	2.850.000
5.1.2.2.1.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.000.000	0	0	16.000.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.415.000	31.400.000	88,66	4.015.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	42.750.975	35,69	77.024.025
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	7.997.300	39,99	12.002.700
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	271.577.082	62,43	163.422.918
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000	16.500.000	91,67	1.500.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	15.755.500	51,91	14.594.500
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.028.000	244.841.124	92,04	21.186.876
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	99.994.000	82.209.810	82,21	17.784.190
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.905.000	4.081.738	83,22	823.262
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.129.000	5.101.278	83,23	1.027.722
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	153.448.298	99	1.551.702
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	16.500.000	91,67	1.500.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	16.500.000	100	0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	85.990.000	81.475.000	94,75	4.515.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	85.990.000	81.475.000	94,75	4.515.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	463.900.000	444.097.902	95,73	19.802.098

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	240.554.000	220.754.802	91,77	19.799.198
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	38.282.000	38.281.125	100	875
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	185.064.000	185.061.975	100	2.025
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	368.043.000	275.800.200	74,94	92.242.800
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	158.513.000	152.512.500	96,21	6.000.500
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	209.530.000	123.287.700	58,84	86.242.300
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	698.650.000	588.532.971	84,24	110.117.029
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	448.650.000	358.104.971	79,82	90.545.029
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	15.048.000	91,20	1.452.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	258.650.000	209.256.971	80,90	49.393.029
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	20.000.000	100	0
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	43.800.000	100	0
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	70.000.000	100	0
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	230.428.000	92,17	19.572.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	230.428.000	92,17	19.572.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.743.539.000	5.281.650.220	91,96	461.888.780
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.493.539.000	5.031.650.220	91,59	461.888.780
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.493.539.000	5.031.650.220	91,59	461.888.780
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000	0	0	18.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000	0	0	18.000.000
5.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000	0	0	18.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.450.335.000	1.449.833.634	99,97	501.366
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.450.335.000	1.449.833.634	99,97	501.366
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.450.335.000	1.449.833.634	99,97	501.366
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.450.335.000	1.449.833.634	99,97	501.366
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.750.000.000	27.787.000.000	96,65	963.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.750.000.000	27.787.000.000	96,65	963.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	28.750.000.000	27.787.000.000	96,65	963.000.000
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	28.750.000.000	27.787.000.000	96,65	963.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.372.492.000	1.247.436.800	90,89	125.055.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.202.036.000	1.141.980.800	95	60.055.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	359.936.000	299.880.800	83,32	60.055.200
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	359.936.000	299.880.800	83,32	60.055.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	223.936.000	163.928.000	73,20	60.008.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	493.800.000	493.800.000	100	0
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	493.800.000	493.800.000	100	0
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	493.800.000	493.800.000	100	0
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	348.300.000	348.300.000	100	0
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	313.300.000	313.300.000	100	0
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	313.300.000	313.300.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	169.007.000	104.007.000	61,54	65.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	169.007.000	104.007.000	61,54	65.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	169.007.000	104.007.000	61,54	65.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud- Software	169.007.000	104.007.000	61,54	65.000.000
	Jumlah Belanja	63.375.080.000	58.614.244.051	92,49	4.760.835.949
	Surplus/(Defisit)	0	(58.614.244.051)	100	58.614.244.051
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(58.614.244.051)	100	58.614.244.051

Semarang, 30 November 2024
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 63.375.080.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.002.588.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.372.492.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Perubahan Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.002.588.000,- dan realisasi sebesar Rp. 57.366.807.251,- dengan Presentasi 92.52 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 17.522.592.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.534.822.809,- dengan Presentasi 88.66 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 28.750.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 27.787.000.000,- dengan Presentasi 96.65 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal mengalokasikan sebesar Rp. 1.372.492.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.247.436.800,- dengan Presentasi 90.89 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.202.036.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.141.980.800,- dengan Presentasi 95%; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.449.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.449.000,- dengan Presentasi

100%; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 169.007.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 104.007.000,- dengan Presentasi 61.54 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	63.375.080.000	57.795.420.134	4.724.513.866	91,20
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.882.584.000	18.865.499.288	3.017.084.712	86,21
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.112.957.000	915.396.691	197.560.309	82,25
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	642.957.000	545.557.197	97.399.803,00	84,85
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	470.000.000	369.839.494	100.160.506,00	78,69
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.460.021.000	12.766.861.460	1.693.159.540	88,29
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.838.081.000	12.192.500.808	1.645.580.192,00	88,11
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	531.240.000	484.198.952	47.041.048,00	91,15
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	49.780.000	220.000,00	99,56
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	25.481.000	219.000,00	99,15
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	9.956.000	44.000,00	99,56
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	172.191.298	7.808.702	95,66
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	6.693.000	3.307.000,00	66,93
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	153.448.298	1.551.702,00	99,00
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	7.550.000	2.450.000,00	75,50
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.500.000	500.000,00	90,00
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	127.094.600	58.145.400	68,61
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	26.819.600	3.180.400,00	89,40
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	26.500.000	3.500.000,00	88,33
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	48.975.000	25.000,00	99,95
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	14.100.000	5.900.000,00	70,50
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.700.000	300.000,00	97,00
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	2.363.949.000	1.775.097.034	588.851.966	75,09
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	50.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	75.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	261.650.500	38.349.500,00	87,22
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.248.000	752.000,00	96,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.449.000	17.949.000	1.500.000,00	92,29
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	27.550.000	2.450.000,00	91,83
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.145.000.000	970.473.130	174.526.870,00	84,76
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	99.500.000	37.650.000	61.850.000,00	37,84
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000.000	290.576.404	309.423.596,00	48,43

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.142.036.000	1.141.980.800	55.200	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	163.936.000	163.928.000	8.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	978.100.000	978.052.800	47.200,00	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.381.000	1.362.588.934	346.792.066	79,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	168.629.602	16.370.398,00	91,15
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	322.325.357	252.449.643,00	56,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	949.606.000	871.633.975	77.972.025,00	91,79
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	729.000.000	604.288.471	124.711.529	82,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	21.569.571	28.430.429,00	43,14
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.000.000	203.442.900	35.557.100,00	85,12
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	70.000.000	-	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	289.276.000	60.724.000,00	82,65
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.601.321.000	33.024.942.262	1.576.378.738	95,44
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	393.655.000	388.305.980	5.349.020	98,64
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	293.655.000	292.909.759	745.241,00	99,75
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	95.396.221	4.603.779,00	95,40
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	168.634.594	11.365.406	93,69
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	92.790.741	7.209.259,00	92,79
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	75.843.853	4.156.147,00	94,80
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	31.711.296.000	30.415.148.681	1.296.147.319	95,91
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.013.453.000	3.772.489.082	240.963.918,00	94,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.697.843.000	26.642.659.599	1.055.183.401,00	96,19
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.316.370.000	2.052.853.007	263.516.993	88,62
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.316.370.000	2.052.853.007	263.516.993,00	88,62
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.656.329.000	2.600.193.604	56.135.396	97,89
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	84.840.000	160.000	99,81
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	84.840.000	160.000,00	99,81
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.571.329.000	2.515.353.604	55.975.396	97,82
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	269.718.000	257.383.389	12.334.611,00	95,43
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	90.563.134	9.436.866,00	90,56
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.201.611.000	2.167.407.081	34.203.919,00	98,45

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.575.411.000	1.564.823.862	10.587.138	99,33
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.575.411.000	1.564.823.862	10.587.138	99,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.470.411.000	1.468.313.710	2.097.290,00	99,86
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	96.510.152	8.489.848,00	91,91
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	399.289.000	377.732.952	21.556.048	94,60
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	399.289.000	377.732.952	21.556.048	94,60
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	399.289.000	377.732.952	21.556.048,00	94,60
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	569.807.452	30.192.548	94,97
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	569.807.452	30.192.548	94,97
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	242.007.952	7.992.048,00	96,80
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	327.799.500	22.200.500,00	93,66
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	582.690.476	7.309.524	98,76
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	582.690.476	7.309.524	98,76
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	150.330.000	147.430.000	2.900.000,00	98,07
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	439.670.000	435.260.476	4.409.524,00	99,00
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	209.730.238	5.269.762	97,55
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	209.730.238	5.269.762	97,55
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Klalifikasi Menengah	215.000.000	209.730.238	5.269.762,00	97,55
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	855.146.000	818.823.917	36.322.083	95,75
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	855.146.000	818.823.917	36.322.083	95,75
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	204.710.706	10.289.294,00	95,21
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	640.146.000	614.113.211	26.032.789,00	95,93
	JUMLAH	63.375.080.000	58.614.244.051	4.760.835.949	92,49



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN OKTOBER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Oktober pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Oktober 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan Oktober sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Oktober 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan.

Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Manajemen

Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.

3. Transparan

Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 63.375.080.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.002.588.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.372.492.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **“Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 31 Oktober 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	63.375.080.000	49.227.741.517	77,68	14.147.338.483
5.1	BELANJA OPERASI	62.002.588.000	47.980.304.717	77,38	14.022.283.283
5.1.1	Belanja Pegawai	14.279.661.000	11.676.925.873	81,77	2.602.735.127
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.793.293.000	4.860.346.677	83,90	932.946.323
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.290.020.000	3.652.940.500	85,15	637.079.500
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.032.492.000	3.453.527.300	85,64	578.964.700
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	257.528.000	199.413.200	77,43	58.114.800
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	376.361.000	316.979.598	84,22	59.381.402
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	365.497.000	309.098.742	84,57	56.398.258
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.864.000	7.880.856	72,54	2.983.144
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	198.500.000	170.760.000	86,03	27.740.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	198.500.000	170.760.000	86,03	27.740.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.060.000	75.020.000	82,39	16.040.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	76.000.000	64.980.000	85,50	11.020.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.060.000	10.040.000	66,67	5.020.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	120.405.000	103.250.000	85,75	17.155.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	120.405.000	103.250.000	85,75	17.155.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	217.563.000	178.587.720	82,09	38.975.280
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	207.674.000	171.200.880	82,44	36.473.120
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.889.000	7.386.840	74,70	2.502.160
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	41.868.000	19.333.116	46,18	22.534.884
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.868.000	19.333.116	46,18	22.534.884
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	544.000	50.954	9,37	493.046
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	416.000	48.562	11,67	367.438
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	128.000	2.392	1,87	125.608
5.1.1.1.9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	392.522.000	314.363.144	80,09	78.158.856
5.1.1.1.9.1	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	381.522.000	306.739.646	80,40	74.782.354
5.1.1.1.9.2	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	11.000.000	7.623.498	69,30	3.376.502
5.1.1.1.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.000.000	7.265.362	66,05	3.734.638
5.1.1.1.10.1	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.000.000	6.855.124	68,55	3.144.876
5.1.1.1.10.2	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.000.000	410.238	41,02	589.762
5.1.1.1.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	32.000.000	21.796.283	68,11	10.203.717

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.000.000	20.565.617	68,55	9.434.383
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.000.000	1.230.666	61,53	769.334
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.450.000	0	0	21.450.000
5.1.1.1.12.1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20.162.000	0	0	20.162.000
5.1.1.1.12.2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.288.000	0	0	1.288.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.044.788.000	6.449.039.196	80,16	1.595.748.804
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.044.788.000	6.449.039.196	80,16	1.595.748.804
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.044.788.000	6.449.039.196	80,16	1.595.748.804
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	441.580.000	367.540.000	83,23	74.040.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	441.580.000	367.540.000	83,23	74.040.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	408.940.000	341.700.000	83,56	67.240.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.640.000	25.840.000	79,17	6.800.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.522.592.000	13.760.261.486	78,53	3.762.330.514
5.1.2.1	Belanja Barang	4.359.939.000	3.051.164.047	69,98	1.308.774.953
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.359.939.000	3.051.164.047	69,98	1.308.774.953
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	235.200.500	78,40	64.799.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	6.800.000	100	0
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	274.800.000	49.934.700	18,17	224.865.300
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	383.722.000	315.120.075	82,12	68.601.925
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	348.745.000	273.366.200	78,39	75.378.800
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	19.150.000	81,11	4.460.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	43.538.000	87,08	6.462.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	11.200.000	10.000.000	89,29	1.200.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34.050.000	32.150.000	94,42	1.900.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.609.000	199.608.727	100	273
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.012.178.000	578.075.845	57,11	434.102.155
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.639.985.000	1.260.970.000	76,89	379.015.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	27.250.000	90,83	2.750.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	6.702.464.000	5.265.522.609	78,56	1.436.941.391
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.461.313.000	4.311.211.449	78,94	1.150.101.551
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	337.200.000	274.600.000	81,44	62.600.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000	0	0	6.750.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.349.090.000	2.774.895.000	82,86	574.195.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	63.850.000	83,33	12.770.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	128.850.000	83,33	25.770.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	5.100.000	66,67	2.550.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	272.733.000	230.663.085	84,57	42.069.915
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	547.910.000	458.127.632	83,61	89.782.368
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	28.500.000	83,33	5.700.000
5.1.2.2.1.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.000.000	0	0	16.000.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	35.415.000	29.650.000	83,72	5.765.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	38.841.269	32,43	80.933.731
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	7.220.500	36,10	12.779.500
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	240.158.463	55,21	194.841.537
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000	15.000.000	83,33	3.000.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	15.755.500	51,91	14.594.500
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	266.028.000	237.528.533	89,29	28.499.467
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	99.994.000	75.679.459	75,68	24.314.541
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.905.000	3.733.738	76,12	1.171.262
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.129.000	4.667.038	76,15	1.461.962
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	153.448.298	99	1.551.702
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	15.750.000	87,50	2.250.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	15.750.000	95,45	750.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	85.990.000	75.700.000	88,03	10.290.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	85.990.000	75.700.000	88,03	10.290.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	463.900.000	316.367.427	68,20	147.532.573

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	240.554.000	220.754.802	91,77	19.799.198
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	38.282.000	0	0	38.282.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	185.064.000	95.612.625	51,66	89.451.375
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	368.043.000	269.800.200	73,31	98.242.800
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	158.513.000	146.512.500	92,43	12.000.500
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	209.530.000	123.287.700	58,84	86.242.300
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	698.650.000	516.120.751	73,87	182.529.249
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	448.650.000	305.095.751	68	143.554.249
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	15.048.000	91,20	1.452.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	258.650.000	177.767.751	68,73	80.882.249
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	10.400.000	52	9.600.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	36.550.000	83,45	7.250.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	65.330.000	93,33	4.670.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	211.025.000	84,41	38.975.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	211.025.000	84,41	38.975.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.743.539.000	4.927.454.079	85,79	816.084.921
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.493.539.000	4.677.454.079	85,14	816.084.921
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.493.539.000	4.677.454.079	85,14	816.084.921
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000	0	0	18.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000	0	0	18.000.000
5.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000	0	0	18.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.450.335.000	997.117.358	68,75	453.217.642
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.450.335.000	997.117.358	68,75	453.217.642
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.450.335.000	997.117.358	68,75	453.217.642
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.450.335.000	997.117.358	68,75	453.217.642
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.750.000.000	21.546.000.000	74,94	7.204.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.750.000.000	21.546.000.000	74,94	7.204.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	28.750.000.000	21.546.000.000	74,94	7.204.000.000
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	28.750.000.000	21.546.000.000	74,94	7.204.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.372.492.000	1.247.436.800	90,89	125.055.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.202.036.000	1.141.980.800	95	60.055.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	359.936.000	299.880.800	83,32	60.055.200
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	359.936.000	299.880.800	83,32	60.055.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	223.936.000	163.928.000	73,20	60.008.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	493.800.000	493.800.000	100	0
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	493.800.000	493.800.000	100	0
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	493.800.000	493.800.000	100	0
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	348.300.000	348.300.000	100	0
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	313.300.000	313.300.000	100	0
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	313.300.000	313.300.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.449.000	1.449.000	100	0
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	169.007.000	104.007.000	61,54	65.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	169.007.000	104.007.000	61,54	65.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	169.007.000	104.007.000	61,54	65.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	169.007.000	104.007.000	61,54	65.000.000
	Jumlah Belanja	63.375.080.000	49.227.741.517	77,68	14.147.338.483
	Surplus/(Defisit)	0	(49.227.741.517)	100	49.227.741.517
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(49.227.741.517)	100	49.227.741.517

Semarang, 31 Oktober 2024
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003

f

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 63.375.080.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.002.588.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.372.492.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Perubahan Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.002.588.000,- dan realisasi sebesar Rp. 47.980.304.717,- dengan Presentasi 77.38 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 17.522.592.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.760.261.486 dengan Presentasi 78.53 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 28.750.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.546.000.000,- dengan Presentasi 74.94 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal mengalokasikan sebesar Rp. 1.372.492.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.247.436.800,- dengan Presentasi 90.89 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.202.036.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.141.980.800,- dengan Presentasi 95%; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.449.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.449.000,- dengan Presentasi

100%; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 169.007.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 104.007.000,- dengan Presentasi 61.54 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	63.375.080.000	48.514.282.923	14.005.651.077	76,55
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.882.584.000	17.448.510.476	4.434.073.524	79,74
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.112.957.000	823.412.227	289.544.773	73,98
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	642.957.000	481.783.565	161.173.435,00	74,93
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	470.000.000	341.628.662	128.371.338,00	72,69
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.460.021.000	11.838.288.693	2.621.732.307	81,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	13.838.081.000	11.309.385.873	2.528.695.127,00	81,73
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	531.240.000	441.701.120	89.538.880,00	83,15
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	48.570.000	1.430.000,00	97,14
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	25.481.000	219.000,00	99,15
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	8.206.000	1.794.000,00	82,06
	Kegiatan Administisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	172.191.298	7.808.702	95,66
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	6.693.000	3.307.000,00	66,93
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	153.448.298	1.551.702,00	99,00
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	7.550.000	2.450.000,00	75,50
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.500.000	500.000,00	90,00
	Kegiatan Administisasi Kepegawainan Perangkat Daerah	185.240.000	120.988.000	64.252.000	65,31
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawainan	30.000.000	20.713.000	9.287.000,00	69,04
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	26.500.000	3.500.000,00	88,33
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	49.975.000	25.000,00	99,95
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	14.100.000	5.900.000,00	70,50
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.700.000	300.000,00	97,00
	Kegiatan Administisasi Umum Perangkat Daerah	2.363.949.000	1.585.733.318	778.215.682	67,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	43.538.000	6.462.000,00	87,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	62.823.500	12.176.500,00	83,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	18.100.000	1.900.000,00	90,50
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	235.200.500	64.799.500,00	78,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.248.000	752.000,00	96,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.449.000	16.449.000	3.000.000,00	84,58
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	27.250.000	2.750.000,00	90,83
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.145.000.000	869.473.330	275.526.670,00	75,94
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	99.500.000	33.400.000	66.100.000,00	33,57
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000.000	255.250.988	344.749.012,00	42,54

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kau (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.142.036.000	1.141.980.800	55.200	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	163.936.000	163.928.000	8.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	978.100.000	978.052.800	47.200,00	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.381.000	1.234.039.889	475.341.111	72,19
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	152.743.380	32.256.620,00	82,56
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	286.220.232	288.554.768,00	49,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	949.606.000	795.076.277	154.529.723,00	83,73
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	729.000.000	531.876.251	197.123.749	72,96
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	16.546.851	33.453.149,00	33,09
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.000.000	176.976.400	62.023.600,00	74,05
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	10.400.000	9.600.000,00	52,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	65.330.000	4.670.000,00	93,33
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	262.623.000	87.377.000,00	75,04
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.601.321.000	26.373.868.280	8.227.452.720	76,22
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	393.655.000	371.646.054	22.008.946	94,41
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	293.655.000	286.741.759	6.913.241,00	97,65
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	84.904.295	15.095.705,00	84,90
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	158.176.142	21.823.858	87,88
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	86.052.815	13.947.185,00	86,05
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	72.123.327	7.876.673,00	90,15
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	31.711.296.000	23.926.731.154	7.784.564.846	75,45
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.013.453.000	2.851.340.730	1.162.112.270,00	71,04
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.697.843.000	21.075.390.424	6.622.452.576,00	76,09
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.316.370.000	1.917.314.930	399.055.070	82,77
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.316.370.000	1.917.314.930	399.055.070,00	82,77
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.656.329.000	1.525.699.670	1.130.629.330	57,44
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	78.190.500	6.809.500	91,99
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	78.190.500	6.809.500,00	91,99
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.571.329.000	1.447.509.170	1.123.819.830	56,29
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	269.718.000	243.688.057	26.029.943,00	90,35
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	75.263.035	24.736.965,00	75,26
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.201.611.000	1.128.558.078	1.073.052.922,00	51,26

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.575.411.000	1.554.202.930	21.208.070	98,65
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.575.411.000	1.554.202.930	21.208.070	98,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.470.411.000	1.467.063.210	3.347.790,00	99,77
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	87.139.720	17.860.280,00	82,99
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	399.289.000	352.588.120	46.700.880	88,30
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	399.289.000	352.588.120	46.700.880	88,30
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	399.289.000	352.588.120	46.700.880,00	88,30
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	530.752.720	69.247.280	88,46
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	530.752.720	69.247.280	88,46
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	229.519.120	20.480.880,00	91,81
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	301.233.600	48.766.400,00	86,07
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	550.786.560	39.213.440	93,35
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	550.786.560	39.213.440	93,35
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	150.330.000	143.060.000	7.270.000,00	95,16
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	439.670.000	407.726.560	31.943.440,00	92,73
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	177.874.167	37.125.833	82,73
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	177.874.167	37.125.833	82,73
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kualifikasi Menengah	215.000.000	177.874.167	37.125.833,00	82,73
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	855.146.000	713.458.594	141.687.406	83,43
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	855.146.000	713.458.594	141.687.406	83,43
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	191.930.788	23.069.212,00	89,27
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	640.146.000	521.527.806	118.618.194,00	81,47
	JUMLAH	63.375.080.000	49.227.741.517	14.147.338.483	77,68



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN SEPTEMBER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan September pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, September 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA. 
NIP. 19660801 199603 1 004.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan September sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, September 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

✓ **Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.**
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan.

Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **“Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 30 September 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	64.247.833.000	43.832.443.217	68,22	20.415.389.783
5.1	BELANJA OPERASI	62.864.383.000	43.049.806.417	68,48	19.814.576.583
5.1.1	Belanja Pegawai	14.789.978.000	10.726.652.976	72,53	4.063.325.024
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.853.000	4.453.858.835	70,71	1.844.994.165
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.448.955.000	3.351.027.700	75,32	1.097.927.300
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.026.253.000	3.180.102.100	78,98	846.150.900
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	422.702.000	170.925.600	40,44	251.776.400
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	493.451.000	290.840.422	58,94	202.610.578
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.271.000	284.433.222	65,50	149.837.778
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	59.180.000	6.407.200	10,83	52.772.800
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.740.000	156.890.000	77,77	44.850.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.740.000	156.890.000	77,77	44.850.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	165.340.000	67.095.000	40,58	98.245.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.160.000	59.565.000	50,41	58.595.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	47.180.000	7.530.000	15,96	39.650.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.430.000	95.320.000	87,91	13.110.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.430.000	95.320.000	87,91	13.110.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.755.000	163.741.620	65,30	87.013.380
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	213.598.000	157.513.500	73,74	56.084.500
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.157.000	6.228.120	16,76	30.928.880
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.250.000	18.750.395	37,31	31.499.605
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.250.000	18.750.395	37,31	31.499.605
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.232.000	46.538	3,78	1.185.462
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.106.000	44.485	4,02	1.061.515
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	126.000	2.053	1,63	123.947
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.000.000	283.943.437	53,68	245.056.563
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	507.000.000	277.618.788	54,76	229.381.212
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.000.000	6.324.649	28,75	15.675.351
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.700.000	6.550.886	51,58	6.149.114
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.200.000	6.209.021	55,44	4.990.979
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	341.865	22,79	1.158.135
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.000.000	19.652.837	53,12	17.347.163

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.500.000	18.627.282	55,60	14.872.718
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.500.000	1.025.555	29,30	2.474.445
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.975.485.000	5.943.504.141	74,52	2.031.980.859
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.975.485.000	5.943.504.141	74,52	2.031.980.859
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.975.485.000	5.943.504.141	74,52	2.031.980.859
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	515.640.000	329.290.000	63,86	186.350.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	515.640.000	329.290.000	63,86	186.350.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.840.000	307.530.000	64,76	167.310.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000	21.760.000	53,33	19.040.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.794.405.000	11.677.981.930	62,14	7.116.423.070
5.1.2.1	Belanja Barang	4.131.272.000	2.043.485.940	49,46	2.087.786.060
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.131.272.000	2.043.485.940	49,46	2.087.786.060
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	208.850.500	69,62	91.149.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	6.800.000	100	0
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000	49.934.700	99,87	65.300
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	357.326.000	282.278.040	79	75.047.960
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	335.571.000	257.231.200	76,65	78.339.800
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	16.750.000	70,94	6.860.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	39.324.000	78,65	10.676.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.000.000	10.000.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.750.000	29.590.000	82,77	6.160.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.486.975.000	1.121.777.500	75,44	365.197.500
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	20.950.000	69,83	9.050.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	8.109.409.000	4.610.603.123	56,85	3.498.805.877
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	6.943.487.000	3.811.100.931	54,89	3.132.386.069
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.600.000	245.000.000	65,93	126.600.000

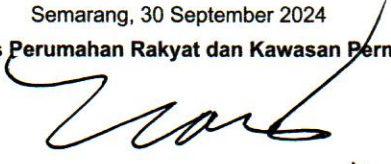
Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.819.570.000	2.473.580.000	51,32	2.345.990.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	57.465.000	75	19.155.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	115.965.000	75	38.655.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	5.100.000	66,67	2.550.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000	209.436.525	76,72	63.563.475
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	548.037.000	368.346.052	67,21	179.690.948
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	25.650.000	75	8.550.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.515.000	27.000.000	78,23	7.515.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	34.963.960	29,19	84.811.040
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	6.443.700	32,22	13.556.300
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	212.895.194	48,94	222.104.806
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	13.500.000	72,78	5.050.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	15.755.500	51,91	14.594.500
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	271.732.000	230.144.473	84,70	41.587.527
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.223.000	69.101.831	65,67	36.121.169
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.116.000	3.375.318	65,98	1.740.682
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.393.000	4.219.026	65,99	2.173.974
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	153.448.298	99	1.551.702
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	13.500.000	75	4.500.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	13.500.000	81,82	3.000.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.000.000	75.700.000	98,31	1.300.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	77.000.000	75.700.000	98,31	1.300.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000	240.950.919	50,73	234.049.081
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	245.000.000	202.198.044	82,53	42.801.956
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.000.000	38.752.875	20,40	151.247.125
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	285.000.000	200.041.800	70,19	84.958.200
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan	160.000.000	140.512.500	87,82	19.487.500

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Bantuan Teknik				
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	125.000.000	59.529.300	47,62	65.470.700
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	719.650.000	463.818.751	64,45	255.831.249
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.650.000	274.277.751	58,40	195.372.249
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	15.048.000	91,20	1.452.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.650.000	156.419.751	55,93	123.230.249
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	10.400.000	52	9.600.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	33.980.000	77,58	9.820.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	58.430.000	83,47	11.570.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	189.541.000	75,82	60.459.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	189.541.000	75,82	60.459.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.834.074.000	4.560.074.116	78,16	1.273.999.884
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.584.074.000	4.310.074.116	77,19	1.273.999.884
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.584.074.000	4.310.074.116	77,19	1.273.999.884
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.5	Belanja Hibah	1.680.000.000	731.171.511	43,52	948.828.489
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	1.680.000.000	731.171.511	43,52	948.828.489
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	1.680.000.000	731.171.511	43,52	948.828.489
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	1.680.000.000	731.171.511	43,52	948.828.489
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	19.914.000.000	72,15	7.686.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.600.000.000	19.914.000.000	72,15	7.686.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	19.914.000.000	72,15	7.686.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	19.914.000.000	72,15	7.686.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.383.450.000	782.636.800	56,57	600.813.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.212.000.000	677.180.800	55,87	534.819.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	225.000.000	163.928.000	72,86	61.072.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	497.900.000	29.000.000	5,82	468.900.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	497.900.000	29.000.000	5,82	468.900.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	497.900.000	29.000.000	5,82	468.900.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	353.100.000	348.300.000	98,64	4.800.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	318.100.000	313.300.000	98,49	4.800.000
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.100.000	313.300.000	98,49	4.800.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	104.007.000	61,18	65.993.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000	104.007.000	61,18	65.993.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	170.000.000	104.007.000	61,18	65.993.000
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000	104.007.000	61,18	65.993.000
	Jumlah Belanja	64.247.833.000	43.832.443.217	68,22	20.415.389.783
	Surplus/(Defisit)	0	(43.832.443.217)	100	43.832.443.217
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(43.832.443.217)	100	43.832.443.217

Semarang, 30 September 2024

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.049.806.417,- dengan Presentasi 68.48 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 18.792.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.677.981.930 dengan Presentasi 62.14 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 27.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.914.000.000,- dengan Presentasi 72.15 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 1.383.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 782.636.800,- dengan Presentasi 56.57 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.212.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 677.180.800,- dengan Presentasi 55.87%; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.449.000,- dengan Presentasi 99.93 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 104.007.000,- dengan Presentasi 61.18 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
1	2	(Rp.) 3	(Rp.) 4	(Rp.) 5	Keu (%) 6
	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	43.165.492.572	20.195.860.428	67,19
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.971.353.000	15.592.669.603	6.378.683.397	70,97
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.000.000	761.618.303	272.381.697	73,66
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000	458.755.473	141.244.527,00	76,46
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.000.000	302.862.830	131.137.170,00	69,78
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.970.338.000	10.877.377.964	4.092.960.036	72,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.274.338.000	10.397.362.976	3.876.975.024,00	72,84
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	396.063.288	209.236.712,00	65,43
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	48.570.000	1.430.000,00	97,14
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	23.981.000	1.719.000,00	93,31
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	6.456.000	3.544.000,00	64,56
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	166.891.298	13.108.702	92,72
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	5.893.000	4.107.000,00	58,93
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	153.448.298	1.551.702,00	99,00
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	4.550.000	5.450.000,00	45,50
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	3.000.000	2.000.000,00	60,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	79.678.000	105.562.000	43,01
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	17.513.000	12.487.000,00	58,38
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	13.300.000	16.700.000,00	44,33
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	39.165.000	10.835.000,00	78,33
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.700.000	300.000,00	97,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.990.000.000	1.486.309.302	503.690.698	74,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	39.324.000	10.676.000,00	78,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	57.740.500	17.259.500,00	76,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	17.240.000	2.760.000,00	86,20
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	208.850.500	91.149.500,00	69,62
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	23.378.000	1.622.000,00	93,51
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	14.949.000	5.051.000,00	74,75
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	20.950.000	9.050.000,00	69,83
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	823.758.230	246.241.770,00	76,99
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	31.150.000	68.850.000,00	31,15
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000	248.969.072	51.030.928,00	82,99

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	677.180.800	474.819.200	58,78
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	165.000.000	163.928.000	1.072.000,00	99,35
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	987.000.000	513.252.800	473.747.200,00	52,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.775.000	1.064.039.685	645.735.315	62,23
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	136.857.158	48.142.842,00	73,98
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	254.302.854	320.472.146,00	44,24
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.000.000	672.879.673	277.120.327,00	70,83
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	479.574.251	270.425.749	63,94
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	16.546.851	33.453.149,00	33,09
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	155.628.400	104.371.600,00	59,86
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	10.400.000	9.600.000,00	52,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	58.430.000	11.570.000,00	83,47
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	238.569.000	111.431.000,00	68,16
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000	24.236.725.464	10.680.274.536	69,41
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	425.000.000	358.466.983	66.533.037	84,35
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	325.000.000	282.535.184	42.464.816,00	86,93
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	75.931.779	24.068.221,00	75,93
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	139.939.290	40.060.710	77,74
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	71.335.889	28.664.111,00	71,34
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	68.603.401	11.396.599,00	85,75
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	32.162.000.000	22.050.753.355	10.111.246.645	68,56
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.330.000.000	2.602.684.704	1.727.315.296,00	60,11
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.832.000.000	19.448.068.651	8.383.931.349,00	69,88
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	1.687.565.856	462.434.144	78,49
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	1.687.565.856	462.434.144,00	78,49
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000	808.389.744	2.134.610.256	27,47
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	68.392.400	16.607.600	80,46
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	68.392.400	16.607.600,00	80,46
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.858.000.000	739.997.344	2.118.002.656	25,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	270.000.000	220.456.625	49.543.375,00	81,65
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	64.439.760	35.560.240,00	64,44
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.488.000.000	455.100.959	2.032.899.041,00	18,29

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	1.037.873.774	687.126.226	60,17
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.725.000.000	1.037.873.774	687.126.226	60,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.620.000.000	957.825.486	662.174.514,00	59,13
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	80.048.288	24.951.712,00	76,24
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	330.186.288	69.813.712	82,55
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	400.000.000	330.186.288	69.813.712	82,55
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	400.000.000	330.186.288	69.813.712,00	82,55
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	497.371.888	102.628.112	82,90
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	497.371.888	102.628.112	82,90
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	214.093.288	35.906.712,00	85,64
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	283.278.600	66.721.400,00	80,94
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	509.974.644	80.025.356	86,44
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	509.974.644	80.025.356	86,44
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	163.460.000	143.060.000	20.400.000,00	87,52
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	426.540.000	366.914.644	59.625.356,00	86,02
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	152.301.167	62.698.833	70,84
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	152.301.167	62.698.833	70,84
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	215.000.000	152.301.167	62.698.833,00	70,84
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000	666.950.645	218.049.355	75,36
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	885.000.000	666.950.645	218.049.355	75,36
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	177.655.870	37.344.130,00	82,63
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	670.000.000	489.294.775	180.705.225,00	73,03
	JUMLAH	64.246.353.000	43.832.443.217	20.413.909.783	68,23



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN AGUSTUS

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Agustus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Agustus 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan Agustus sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Agustus 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan.

Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **“Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan
3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 31 Agustus 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	40.782.253.833	63,48	23.464.099.167
5.1	BELANJA OPERASI	62.862.903.000	40.043.906.033	63,70	22.818.996.967
5.1.1	Belanja Pegawai	14.789.978.000	9.782.684.441	66,14	5.007.293.559
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.853.000	4.048.425.422	64,27	2.250.427.578
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.448.955.000	3.050.019.400	68,56	1.398.935.600
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.026.253.000	2.907.581.400	72,22	1.118.671.600
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	422.702.000	142.438.000	33,70	280.264.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	493.451.000	264.739.286	53,65	228.711.714
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.271.000	259.805.742	59,83	174.465.258
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	59.180.000	4.933.544	8,34	54.246.456
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.740.000	143.020.000	70,89	58.720.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.740.000	143.020.000	70,89	58.720.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	165.340.000	59.170.000	35,79	106.170.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.160.000	54.150.000	45,83	64.010.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	47.180.000	5.020.000	10,64	42.160.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.430.000	87.395.000	80,60	21.035.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.430.000	87.395.000	80,60	21.035.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.755.000	148.895.520	59,38	101.859.480
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	213.598.000	143.826.120	67,33	69.771.880
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.157.000	5.069.400	13,64	32.087.600
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.250.000	18.197.435	36,21	32.052.565
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.250.000	18.197.435	36,21	32.052.565
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.232.000	42.260	3,43	1.189.740
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.106.000	40.546	3,67	1.065.454
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	126.000	1.714	1,36	124.286
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.000.000	253.592.036	47,94	275.407.964
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	507.000.000	248.566.236	49,03	258.433.764
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.000.000	5.025.800	22,84	16.974.200
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.700.000	5.838.581	45,97	6.861.419
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.200.000	5.565.089	49,69	5.634.911
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	273.492	18,23	1.226.508
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.000.000	17.515.904	47,34	19.484.096

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	33.500.000	16.695.460	49,84	16.804.540
5.1.1.1.11.2	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	3.500.000	820.444	23,44	2.679.556
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.975.485.000	5.439.139.019	68,20	2.536.345.981
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.975.485.000	5.439.139.019	68,20	2.536.345.981
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.975.485.000	5.439.139.019	68,20	2.536.345.981
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	515.640.000	295.120.000	57,23	220.520.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	515.640.000	295.120.000	57,23	220.520.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.840.000	273.360.000	57,57	201.480.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000	21.760.000	53,33	19.040.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	10.290.858.769	54,76	8.502.066.231
5.1.2.1	Belanja Barang	4.131.272.000	1.831.509.510	44,33	2.299.762.490
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.131.272.000	1.831.509.510	44,33	2.299.762.490
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	183.700.500	61,23	116.299.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	6.800.000	100	0
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000	49.934.700	99,87	65.300
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	357.326.000	264.623.710	74,06	92.702.290
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	335.571.000	229.299.600	68,33	106.271.400
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	14.750.000	62,47	8.860.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	36.071.000	72,14	13.929.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.000.000	10.000.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.750.000	29.590.000	82,77	6.160.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.486.975.000	988.990.000	66,51	497.985.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	17.750.000	59,17	12.250.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	8.109.409.000	3.936.328.180	48,54	4.173.080.820
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	6.943.487.000	3.411.775.785	49,14	3.531.711.215
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.600.000	233.400.000	62,81	138.200.000

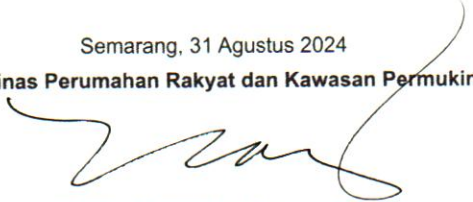
Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.819.570.000	2.166.530.000	44,95	2.653.040.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	51.080.000	66,67	25.540.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	103.080.000	66,67	51.540.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	5.100.000	66,67	2.550.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000	188.209.965	68,94	84.790.035
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	548.037.000	368.346.052	67,21	179.690.948
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	22.800.000	66,67	11.400.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.515.000	23.550.000	68,23	10.965.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	31.114.907	25,98	88.660.093
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	5.666.900	28,33	14.333.100
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	185.142.461	42,56	249.857.539
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	12.000.000	64,69	6.550.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	15.755.500	51,91	14.594.500
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	271.732.000	69.233.751	25,48	202.498.249
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.223.000	62.445.839	59,35	42.777.161
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.116.000	3.016.898	58,97	2.099.102
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.393.000	3.771.014	58,99	2.621.986
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	13.500.000	75	4.500.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	13.500.000	81,82	3.000.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.000.000	75.700.000	98,31	1.300.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	77.000.000	75.700.000	98,31	1.300.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000	192.441.144	40,51	282.558.856
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	245.000.000	192.441.144	78,55	52.558.856
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	285.000.000	134.512.500	47,20	150.487.500
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan	160.000.000	134.512.500	84,07	25.487.500

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Bantuan Teknik				
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	125.000.000	0	0	125.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	719.650.000	426.647.751	59,29	293.002.249
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.650.000	256.147.751	54,54	213.502.249
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	15.048.000	91,20	1.452.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.650.000	146.849.751	52,51	132.800.249
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	10.400.000	52	9.600.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	32.040.000	73,15	11.760.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	51.810.000	74,01	18.190.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	170.500.000	68,20	79.500.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	170.500.000	68,20	79.500.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.832.594.000	4.096.373.328	70,23	1.736.220.672
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.582.594.000	3.846.373.328	68,90	1.736.220.672
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.582.594.000	3.846.373.328	68,90	1.736.220.672
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.5	Belanja Hibah	1.680.000.000	252.362.823	15,02	1.427.637.177
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.680.000.000	252.362.823	15,02	1.427.637.177
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	252.362.823	15,02	1.427.637.177
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	252.362.823	15,02	1.427.637.177
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	19.718.000.000	71,44	7.882.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.600.000.000	19.718.000.000	71,44	7.882.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	19.718.000.000	71,44	7.882.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	19.718.000.000	71,44	7.882.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.383.450.000	738.347.800	53,37	645.102.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.212.000.000	677.180.800	55,87	534.819.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	225.000.000	163.928.000	72,86	61.072.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	497.900.000	29.000.000	5,82	468.900.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	497.900.000	29.000.000	5,82	468.900.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	497.900.000	29.000.000	5,82	468.900.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	353.100.000	348.300.000	98,64	4.800.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	318.100.000	313.300.000	98,49	4.800.000
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.100.000	313.300.000	98,49	4.800.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
	Jumlah Belanja	64.246.353.000	40.782.253.833	63,48	23.464.099.167
	Surplus/(Defisit)	0	(40.782.253.833)	100	40.782.253.833
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(40.782.253.833)	100	40.782.253.833

Semarang, 31 Agustus 2024

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

1

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.043.906.033,- dengan Presentasi 63.70 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 18.792.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.290.858.769,- dengan Presentasi 54.76%. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 27.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.718.000.000,- dengan Presentasi 71.44 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 1.383.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 738.347.800,- dengan Presentasi 53.37 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.212.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 677.180.800,- dengan Presentasi 55.87%; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.449.000,- dengan Presentasi 99.93 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 59.718.000,- dengan Presentasi 35.13 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	40.203.012.137	23.158.340.863	62,58
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.971.353.000	14.068.980.526	7.902.372.474	64,03
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.000.000	628.276.239	405.723.761	60,76
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000	377.181.741	222.818.259,00	62,86
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.000.000	251.094.498	182.905.502,00	57,86
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.970.338.000	9.924.811.597	5.045.526.403	66,30
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.274.338.000	9.487.564.441	4.786.773.559,00	66,47
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	354.505.456	250.794.544,00	58,57
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	47.360.000	2.640.000,00	94,72
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	23.981.000	1.719.000,00	93,31
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	6.456.000	3.544.000,00	64,56
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	12.443.000	167.557.000	6,91
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	5.893.000	4.107.000,00	58,93
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	4.550.000	5.450.000,00	45,50
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	2.000.000	3.000.000,00	40,00
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	79.678.000	105.562.000	43,01
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	17.513.000	12.487.000,00	58,38
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	13.300.000	16.700.000,00	44,33
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	39.165.000	10.835.000,00	78,33
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.700.000	300.000,00	97,00
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	1.990.000.000	1.320.127.786	669.872.214	66,34
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	36.071.000	13.929.000,00	72,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	57.740.500	17.259.500,00	76,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	17.240.000	2.760.000,00	86,20
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	183.700.500	116.299.500,00	61,23
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	22.100.000	2.900.000,00	88,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	13.449.000	6.551.000,00	67,25
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	17.750.000	12.250.000,00	59,17
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	699.225.630	370.774.370,00	65,35
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	31.150.000	68.850.000,00	31,15
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000	241.701.156	58.298.844,00	80,57

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	677.180.800	474.819.200	58,78
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	165.000.000	163.928.000	1.072.000,00	99,35
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	987.000.000	513.252.800	473.747.200,00	52,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.775.000	984.059.853	725.715.147	57,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	121.370.936	63.629.064,00	65,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	221.924.268	352.850.732,00	38,61
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.000.000	640.764.649	309.235.351,00	67,45
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	442.403.251	307.596.749	58,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	16.546.851	33.453.149,00	33,09
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	146.058.400	113.941.600,00	56,18
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	10.400.000	9.600.000,00	52,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	51.810.000	18.190.000,00	74,01
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	217.588.000	132.412.000,00	62,17
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000	23.554.053.104	11.362.946.896	67,46
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	425.000.000	351.923.182	73.076.818	82,81
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	325.000.000	279.684.329	45.315.671,00	86,06
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	72.238.853	27.761.147,00	72,24
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	122.758.438	57.241.562	68,20
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	57.866.563	42.133.437,00	57,87
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	64.891.875	15.108.125,00	81,11
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	32.162.000.000	21.636.809.991	10.525.190.009	67,27
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.330.000.000	2.562.491.778	1.767.508.222,00	59,18
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.832.000.000	19.074.318.213	8.757.681.787,00	68,53
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	1.442.561.493	707.438.507	67,10
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	1.442.561.493	707.438.507,00	67,10
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000	752.429.721	2.190.570.279	25,57
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	60.721.400	24.278.600	71,44
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	60.721.400	24.278.600,00	71,44
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.858.000.000	691.708.321	2.166.291.679	24,20
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	270.000.000	206.938.793	63.061.207,00	76,64
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	59.116.485	40.883.515,00	59,12
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.488.000.000	425.653.043	2.062.346.957,00	17,11

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	487.951.879	1.237.048.121	28,29
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.725.000.000	487.951.879	1.237.048.121	28,29
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.620.000.000	414.995.023	1.205.004.977,00	25,62
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	72.956.856	32.043.144,00	69,48
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	255.979.456	144.020.544	63,99
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	400.000.000	255.979.456	144.020.544	63,99
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	400.000.000	255.979.456	144.020.544,00	63,99
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	463.956.556	136.043.444	77,33
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	463.956.556	136.043.444	77,33
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	189.992.456	60.007.544,00	76,00
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	273.964.100	76.035.900,00	78,28
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	475.500.728	114.499.272	80,59
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	475.500.728	114.499.272	80,59
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	163.460.000	119.750.000	43.710.000,00	73,26
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	426.540.000	355.750.728	70.789.272,00	83,40
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	144.160.167	70.839.833	67,05
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	144.160.167	70.839.833	67,05
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kualifikasi Menengah	215.000.000	144.160.167	70.839.833,00	67,05
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000	579.241.696	305.758.304	65,45
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	885.000.000	579.241.696	305.758.304	65,45
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	156.168.452	58.831.548,00	72,64
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	670.000.000	423.073.244	246.926.756,00	63,15
	JUMLAH	64.246.353.000	40.782.253.833	23.464.099.167	63,48



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN JULI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Juli pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juli 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pegguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

26
↑



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan Juli sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Juli 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan.

Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratraktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “.

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.

* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 31 Juli 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	36.876.631.053	57,40	27.369.721.947
5.1	BELANJA OPERASI	62.862.903.000	36.138.283.253	57,49	26.724.619.747
5.1.1	Belanja Pegawai	14.789.978.000	8.809.336.566	59,56	5.980.641.434
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.853.000	3.635.321.072	57,71	2.663.531.928
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.448.955.000	2.743.776.100	61,67	1.705.178.900
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.026.253.000	2.629.825.700	65,32	1.396.427.300
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	422.702.000	113.950.400	26,96	308.751.600
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	493.451.000	237.917.464	48,22	255.533.536
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.271.000	234.457.576	53,99	199.813.424
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	59.180.000	3.459.888	5,85	55.720.112
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.740.000	129.150.000	64,02	72.590.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.740.000	129.150.000	64,02	72.590.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	165.340.000	51.245.000	30,99	114.095.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.160.000	48.735.000	41,24	69.425.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	47.180.000	2.510.000	5,32	44.670.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.430.000	79.095.000	72,95	29.335.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.430.000	79.095.000	72,95	29.335.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.755.000	133.759.740	53,34	116.995.260
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	213.598.000	129.849.060	60,79	83.748.940
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.157.000	3.910.680	10,52	33.246.320
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.250.000	17.627.975	35,08	32.622.025
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.250.000	17.627.975	35,08	32.622.025
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.232.000	38.006	3,08	1.193.994
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.106.000	36.631	3,31	1.069.369
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	126.000	1.375	1,09	124.625
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.000.000	222.297.236	42,02	306.702.764
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	507.000.000	218.570.285	43,11	288.429.715
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.000.000	3.726.951	16,94	18.273.049
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.700.000	5.103.602	40,19	7.596.398
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.200.000	4.898.483	43,74	6.301.517
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	205.119	13,67	1.294.881
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.000.000	15.310.949	41,38	21.689.051
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.500.000	14.695.616	43,87	18.804.384

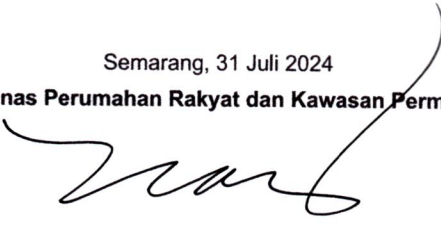
Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.500.000	615.333	17,58	2.884.667
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.975.485.000	4.915.785.494	61,64	3.059.699.506
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.975.485.000	4.915.785.494	61,64	3.059.699.506
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.975.485.000	4.915.785.494	61,64	3.059.699.506
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	515.640.000	258.230.000	50,08	257.410.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	515.640.000	258.230.000	50,08	257.410.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.840.000	239.190.000	50,37	235.650.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000	19.040.000	46,67	21.760.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	8.910.946.687	47,42	9.881.978.313
5.1.2.1	Belanja Barang	4.131.272.000	1.576.736.910	38,17	2.554.535.090
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.131.272.000	1.576.736.910	38,17	2.554.535.090
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	126.900.500	42,30	173.099.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	6.800.000	100	0
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000	0	0	50.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	357.326.000	243.813.810	68,23	113.512.190
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	335.571.000	218.011.600	64,97	117.559.400
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	13.050.000	55,27	10.560.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	33.011.000	66,02	16.989.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.000.000	10.000.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.750.000	28.710.000	80,31	7.040.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.486.975.000	878.690.000	59,09	608.285.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	17.750.000	59,17	12.250.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	8.109.409.000	3.361.487.918	41,45	4.747.921.082
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	6.943.487.000	2.925.981.408	42,14	4.017.505.592
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.600.000	208.700.000	56,16	162.900.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.819.570.000	1.838.470.000	38,15	2.981.100.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	44.695.000	58,33	31.925.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	90.195.000	58,33	64.425.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	0	0	7.650.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000	166.983.405	61,17	106.016.595
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	548.037.000	323.455.262	59,02	224.581.738
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	19.950.000	58,33	14.250.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.515.000	22.750.000	65,91	11.765.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	27.258.133	22,76	92.516.867
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	4.890.100	24,45	15.109.900
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	156.016.508	35,87	278.983.492
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	10.500.000	56,60	8.050.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	12.118.000	39,93	18.232.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	271.732.000	61.887.866	22,78	209.844.134
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.223.000	55.931.247	53,15	49.291.753
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.116.000	2.643.348	51,67	2.472.652
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.393.000	3.313.271	51,83	3.079.729
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	13.500.000	75	4.500.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	13.500.000	81,82	3.000.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000	192.441.144	40,51	282.558.856
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	245.000.000	192.441.144	78,55	52.558.856
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	285.000.000	128.512.500	45,09	156.487.500
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000	128.512.500	80,32	31.487.500
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	125.000.000	0	0	125.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	719.650.000	377.796.851	52,50	341.853.149
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.650.000	226.696.851	48,27	242.953.149
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	15.048.000	91,20	1.452.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.650.000	125.413.851	44,85	154.236.149
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	10.400.000	52	9.600.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	30.115.000	68,76	13.685.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	45.720.000	65,31	24.280.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	151.100.000	60,44	98.900.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	151.100.000	60,44	98.900.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.832.594.000	3.594.925.008	61,64	2.237.668.992
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.582.594.000	3.344.925.008	59,92	2.237.668.992
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.582.594.000	3.344.925.008	59,92	2.237.668.992
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	250.000.000	100	0
5.1.5	Belanja Hibah	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	18.418.000.000	66,73	9.182.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.600.000.000	18.418.000.000	66,73	9.182.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	18.418.000.000	66,73	9.182.000.000
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	18.418.000.000	66,73	9.182.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.383.450.000	738.347.800	53,37	645.102.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.212.000.000	677.180.800	55,87	534.819.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	225.000.000	163.928.000	72,86	61.072.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	497.900.000	29.000.000	5,82	468.900.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	497.900.000	29.000.000	5,82	468.900.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	497.900.000	29.000.000	5,82	468.900.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	353.100.000	348.300.000	98,64	4.800.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	318.100.000	313.300.000	98,49	4.800.000
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.100.000	313.300.000	98,49	4.800.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	35.000.000	100	0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.450.000	1.449.000	99,93	1.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
	Jumlah Belanja	64.246.353.000	36.876.631.053	57,40	27.369.721.947
	Surplus/(Defisit)	0	(36.876.631.053)	100	36.876.631.053
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(36.876.631.053)	100	36.876.631.053

Semarang, 31 Juli 2024
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan realisasi sebesar Rp. 36.138.283.253,- dengan Presentasi 57.49 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 18.792.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.910.946.687,- dengan Presentasi 47.42%. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 27.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.418.000.000,- dengan Presentasi 66.73 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 1.383.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 738.347.800,- dengan Presentasi 53.37 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.212.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 677.180.800,- dengan Presentasi 55.87%; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 1.449.000,- dengan Presentasi 99.93 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 59.718.000,- dengan Presentasi 35.13 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	36.365.987.806	26.995.365.194	56,60
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.971.353.000	12.583.784.100	9.387.568.900	57,27
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.000.000	578.578.935	455.421.065	55,96
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000	359.533.269	240.466.731,00	59,92
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.000.000	219.045.666	214.954.334,00	50,47
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.970.338.000	8.938.809.890	6.031.528.110	59,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.274.338.000	8.551.106.566	5.723.231.434,00	59,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	310.227.624	295.072.376,00	51,25
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	42.752.000	7.248.000,00	85,50
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	23.981.000	1.719.000,00	93,31
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	5.798.000	4.202.000,00	57,98
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	11.443.000	168.557.000	6,36
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	5.893.000	4.107.000,00	58,93
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	3.550.000	6.450.000,00	35,50
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	2.000.000	3.000.000,00	40,00
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	78.678.000	106.562.000	42,47
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	17.513.000	12.487.000,00	58,38
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	12.300.000	17.700.000,00	41,00
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	39.165.000	10.835.000,00	78,33
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.700.000	300.000,00	97,00
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	1.990.000.000	1.050.170.334	939.829.666	52,77
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	33.011.000	16.989.000,00	66,02
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	52.537.500	22.462.500,00	70,05
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	16.360.000	3.640.000,00	81,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	126.900.500	173.099.500,00	42,30
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	20.795.000	4.205.000,00	83,18
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	11.949.000	8.051.000,00	59,75
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	17.750.000	12.250.000,00	59,17
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	640.208.710	429.791.290,00	59,83

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	29.900.000	70.100.000,00	29,90
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000	100.758.624	199.241.376,00	33,59
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	677.180.800	474.819.200	58,78
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	165.000.000	163.928.000	1.072.000,00	99,35
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	987.000.000	513.252.800	473.747.200,00	52,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.775.000	859.008.290	850.766.710	50,24
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	106.184.714	78.815.286,00	57,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	188.164.741	386.610.259,00	32,74
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.000.000	564.658.835	385.341.165,00	59,44
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	389.914.851	360.085.149	51,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	16.546.851	33.453.149,00	33,09
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	120.985.000	139.015.000,00	46,53
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	10.400.000	9.600.000,00	52,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	45.720.000	24.280.000,00	65,31
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	196.263.000	153.737.000,00	56,08
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000	21.707.720.895	13.209.279.105	62,17
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	425.000.000	343.300.411	81.699.589	80,78
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	325.000.000	274.761.829	50.238.171,00	84,54
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	68.538.582	31.461.418,00	68,54
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	85.037.224	94.962.776	47,24
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	38.716.037	61.283.963,00	38,72
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	46.321.187	33.678.813,00	57,90
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	32.162.000.000	20.073.710.275	12.088.289.725	62,41
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.330.000.000	2.482.029.052	1.847.970.948,00	57,32
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.832.000.000	17.591.681.223	10.240.318.777,00	63,21
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	1.205.672.985	944.327.015	56,08
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	1.205.672.985	944.327.015,00	56,08

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000	699.287.860	2.243.712.140	23,76
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	54.255.900	30.744.100	63,83
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	54.255.900	30.744.100,00	63,83
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.858.000.000	645.031.960	2.212.968.040	22,57
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	270.000.000	194.468.523	75.531.477,00	72,03
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	48.040.210	51.959.790,00	48,04
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.488.000.000	402.523.227	2.085.476.773,00	16,18
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	215.580.624	1.509.419.376	12,50
	Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU Permukiman	1.725.000.000	215.580.624	1.509.419.376	12,50
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.620.000.000	149.715.200	1.470.284.800,00	9,24
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	65.865.424	39.134.576,00	62,73
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	230.294.624	169.705.376	57,57
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	400.000.000	230.294.624	169.705.376	57,57
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	400.000.000	230.294.624	169.705.376,00	57,57
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	391.155.224	208.844.776	65,19
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	391.155.224	208.844.776	65,19
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	166.500.624	83.499.376,00	66,60
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	224.654.600	125.345.400,00	64,19
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	422.676.812	167.323.188	71,64
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintah Daerah Kabupataan/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	422.676.812	167.323.188	71,64
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	163.460.000	108.190.000	55.270.000,00	66,19
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	426.540.000	314.486.812	112.053.188,00	73,73
VIII.	PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	115.487.667	99.512.333	53,72
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Uliitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	115.487.667	99.512.333	53,72
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	215.000.000	115.487.667	99.512.333,00	53,72
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000	510.643.247	374.356.753	57,70
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	885.000.000	510.643.247	374.356.753	57,70

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	124.775.534	90.224.466,00	58,04
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	670.000.000	385.867.713	284.132.287,00	57,59
	JUMLAH	64.246.353.000	36.876.631.053	27.369.721.947	57,40



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN JUNI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Juni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juni 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan Juni sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Juni 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratraktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “.

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.

* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 30 Juni 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	31.401.726.764	48,88	32.844.626.236
5.1	BELANJA OPERASI	62.862.903.000	31.042.127.964	49,38	31.820.775.036
5.1.1	Belanja Pegawai	14.789.978.000	7.824.956.116	52,91	6.965.021.884
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.853.000	3.217.097.281	51,07	3.081.755.719
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.448.955.000	2.433.305.600	54,69	2.015.649.400
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.026.253.000	2.347.842.800	58,31	1.678.410.200
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	422.702.000	85.462.800	20,22	337.239.200
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	493.451.000	211.058.308	42,77	282.392.692
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.271.000	208.751.716	48,07	225.519.284
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	59.180.000	2.306.592	3,90	56.873.408
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.740.000	115.280.000	57,14	86.460.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.740.000	115.280.000	57,14	86.460.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	165.340.000	43.320.000	26,20	122.020.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.160.000	43.320.000	36,66	74.840.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	47.180.000	0	0	47.180.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.430.000	70.615.000	65,12	37.815.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.430.000	70.615.000	65,12	37.815.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.755.000	118.479.120	47,25	132.275.880
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	213.598.000	115.654.740	54,15	97.943.260
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.157.000	2.824.380	7,60	34.332.620
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.250.000	16.968.903	33,77	33.281.097
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.250.000	16.968.903	33,77	33.281.097
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.232.000	33.789	2,74	1.198.211
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.106.000	32.729	2,96	1.073.271
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	126.000	1.060	0,84	124.940
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.000.000	190.602.526	36,03	338.397.474
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	507.000.000	188.161.610	37,11	318.838.390
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.000.000	2.440.916	11,10	19.559.084
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.700.000	4.358.477	34,32	8.341.523
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.200.000	4.221.731	37,69	6.978.269
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	136.746	9,12	1.363.254
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.000.000	13.075.558	35,34	23.924.442

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	33.500.000	12.665.336	37,81	20.834.664
5.1.1.1.11.2	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	3.500.000	410.222	11,72	3.089.778
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.975.485.000	4.386.518.835	55	3.588.966.165
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.975.485.000	4.386.518.835	55	3.588.966.165
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.975.485.000	4.386.518.835	55	3.588.966.165
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	515.640.000	221.340.000	42,93	294.300.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	515.640.000	221.340.000	42,93	294.300.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.840.000	205.020.000	43,18	269.820.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000	16.320.000	40	24.480.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	7.239.171.848	38,52	11.553.753.152
5.1.2.1	Belanja Barang	4.131.272.000	1.321.887.620	32	2.809.384.380
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.131.272.000	1.321.887.620	32	2.809.384.380
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	126.900.500	42,30	173.099.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	0	0	6.800.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000	0	0	50.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	357.326.000	216.813.220	60,68	140.512.780
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	335.571.000	164.682.400	49,08	170.888.600
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	11.550.000	48,92	12.060.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	29.994.000	59,99	20.006.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.000.000	0	0	10.000.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.750.000	20.830.000	58,27	14.920.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.486.975.000	741.617.500	49,87	745.357.500
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	9.500.000	31,67	20.500.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	8.109.409.000	2.811.670.755	34,67	5.297.738.245
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	6.943.487.000	2.488.149.340	35,83	4.455.337.660
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.600.000	179.100.000	48,20	192.500.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.819.570.000	1.551.795.000	32,20	3.267.775.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	38.310.000	50	38.310.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	77.310.000	50	77.310.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	0	0	7.650.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000	145.240.945	53,20	127.759.055
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	548.037.000	278.564.472	50,83	269.472.528
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	17.100.000	50	17.100.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	34.515.000	20.450.000	59,25	14.065.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	23.376.291	19,52	96.398.709
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	4.113.300	20,57	15.886.700
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	131.671.332	30,27	303.328.668
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	9.000.000	48,52	9.550.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	12.118.000	39,93	18.232.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	271.732.000	54.415.271	20,03	217.316.729
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.223.000	49.275.255	46,83	55.947.745
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.116.000	2.284.488	44,65	2.831.512
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.393.000	2.855.528	44,67	3.537.472
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	13.500.000	75	4.500.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	13.500.000	81,82	3.000.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000	192.441.144	40,51	282.558.856
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	245.000.000	192.441.144	78,55	52.558.856
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	285.000.000	24.000.000	8,42	261.000.000
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan	160.000.000	24.000.000	15	136.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Bantuan Teknik				
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	125.000.000	0	0	125.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	719.650.000	322.232.000	44,78	397.418.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.650.000	191.132.000	40,70	278.518.000
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	15.048.000	91,20	1.452.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.650.000	99.084.000	35,43	180.566.000
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	10.400.000	52	9.600.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	28.120.000	64,20	15.680.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	38.480.000	54,97	31.520.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	131.100.000	52,44	118.900.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	131.100.000	52,44	118.900.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.832.594.000	2.783.381.473	47,72	3.049.212.527
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.582.594.000	2.783.381.473	49,86	2.799.212.527
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.582.594.000	2.783.381.473	49,86	2.799.212.527
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	15.978.000.000	57,89	11.622.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.600.000.000	15.978.000.000	57,89	11.622.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	15.978.000.000	57,89	11.622.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	15.978.000.000	57,89	11.622.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.383.450.000	359.598.800	25,99	1.023.851.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.212.000.000	299.880.800	24,74	912.119.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	225.000.000	163.928.000	72,86	61.072.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	353.100.000	0	0	353.100.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
	Jumlah Belanja	64.246.353.000	31.401.726.764	48,88	32.844.626.236
	Surplus/(Defisit)	0	(31.401.726.764)	100	31.401.726.764
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(31.401.726.764)	100	31.401.726.764

Semarang, 30 Juni 2024
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.042.127.964,- dengan Presentasi 49.38 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 18.792.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.239.171.848,- dengan Presentasi 38.52%. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 27.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.978.000.000,- dengan Presentasi 57.89 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal mengalokasikan sebesar Rp. 1.383.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 359.598.800,- dengan Presentasi 25.99 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.212.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 299.880.800,- dengan Presentasi 24.74%; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 59.718.000,- dengan Presentasi 35.13 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	30.973.261.466	32.388.091.534	48,21
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.971.353.000	10.486.929.657	11.484.423.343	47,73
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.000.000	456.535.571	577.464.429	44,15
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000	319.824.437	280.175.563,00	53,30
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.000.000	136.711.134	297.288.866,00	31,50
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.970.338.000	7.926.182.608	7.044.155.392	52,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	14.274.338.000	7.603.616.116	6.670.721.884,00	53,27
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	265.949.792	339.350.208,00	43,94
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	30.899.000	19.101.000,00	61,80
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	16.725.000	8.975.000,00	65,08
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	4.048.000	5.952.000,00	40,48
	Kegiatan Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	8.493.000	171.507.000	4,72
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	5.893.000	4.107.000,00	58,93
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	1.850.000	8.150.000,00	18,50
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	750.000	4.250.000,00	15,00
	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	58.928.000	126.312.000	31,81
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	8.963.000	21.037.000,00	29,88
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	10.800.000	19.200.000,00	36,00
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	39.165.000	10.835.000,00	78,33
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah	1.990.000.000	665.063.142	1.324.936.858	33,42
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	29.994.000	20.006.000,00	59,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	46.408.500	28.591.500,00	61,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	8.630.000	11.370.000,00	43,15
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	126.900.500	173.099.500,00	42,30
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	19.949.000	5.051.000,00	79,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	9.000.000	11.000.000,00	45,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	9.500.000	20.500.000,00	31,67
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	317.190.350	752.809.650,00	29,64
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	28.650.000	71.350.000,00	28,65
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000	68.840.792	231.159.208,00	22,95
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	299.880.800	852.119.200	26,03
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	165.000.000	163.928.000	1.072.000,00	99,35
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	987.000.000	135.952.800	851.047.200,00	13,77

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.775.000	737.496.536	972.278.464	43,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	91.198.492	93.801.508,00	49,30
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	159.160.923	415.614.077,00	27,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.000.000	487.137.121	462.862.879,00	51,28
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	334.350.000	415.650.000	44,58
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	13.822.000	36.178.000,00	27,64
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	97.380.000	162.620.000,00	37,45
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	10.400.000	9.600.000,00	52,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	38.480.000	31.520.000,00	54,97
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	174.268.000	175.732.000,00	49,79
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000	18.690.371.433	16.226.628.567	53,53
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	425.000.000	212.265.174	212.734.826	49,94
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	325.000.000	161.984.549	163.015.451,00	49,84
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	50.280.625	49.719.375,00	50,28
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	70.754.212	109.245.788	39,31
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	34.123.111	65.876.889,00	34,12
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	36.631.101	43.368.899,00	45,79
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	32.162.000.000	17.419.348.869	14.742.653.131	54,16
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.330.000.000	2.342.287.776	1.987.712.224,00	54,09
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.832.000.000	15.077.059.093	12.754.940.907,00	54,17
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	988.005.178	1.161.994.822	45,95
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	988.005.178	1.161.994.822,00	45,95
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000	636.016.937	2.306.983.063	21,61
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	36.235.000	48.765.000	42,63
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	36.235.000	48.765.000,00	42,63
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.858.000.000	599.781.937	2.258.218.063	20,99
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	270.000.000	184.805.191	85.194.809,00	68,45
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	39.516.435	60.483.565,00	39,52
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.488.000.000	375.460.311	2.112.539.689,00	15,09
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	183.414.192	1.541.585.808	10,63
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.725.000.000	183.414.192	1.541.585.808	10,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.620.000.000	135.005.200	1.484.994.800,00	8,33
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	48.408.992	56.591.008,00	46,10

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	204.535.792	195.464.208	51,13
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	400.000.000	204.535.792	195.464.208	51,13
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	400.000.000	204.535.792	195.464.208,00	51,13
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	332.484.892	267.515.108	55,41
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	332.484.892	267.515.108	55,41
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	146.988.292	103.011.708,00	58,80
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	185.496.600	164.503.400,00	53,00
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	350.322.896	239.677.104	59,38
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	350.322.896	239.677.104	59,38
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	163.460.000	95.540.000	67.920.000,00	58,45
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	426.540.000	254.782.896	171.757.104,00	59,73
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	89.185.667	125.814.333	41,48
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	89.185.667	125.814.333	41,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	215.000.000	89.185.667	125.814.333,00	41,48
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000	428.465.298	456.534.702	48,41
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	885.000.000	428.465.298	456.534.702	48,41
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	100.224.616	114.775.384,00	46,62
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	670.000.000	328.240.682	341.759.318,00	48,99
	JUMLAH	64.246.353.000	31.401.726.764	32.844.626.236	48,88



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN MEI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Mei pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Mei 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

**JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan Mei sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang,

Mei 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan.

Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratraktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “.

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.

* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 31 Mei 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	23.081.103.508	35,93	41.165.249.492
5.1	BELANJA OPERASI	62.862.903.000	22.721.504.708	36,14	40.141.398.292
5.1.1	Belanja Pegawai	14.789.978.000	5.817.886.622	39,34	8.972.091.378
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.853.000	2.358.401.454	37,44	3.940.451.546
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.448.955.000	1.762.313.500	39,61	2.686.641.500
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.026.253.000	1.762.313.500	43,77	2.263.939.500
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	422.702.000	0	0	422.702.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	493.451.000	156.372.664	31,69	337.078.336
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.271.000	156.372.664	36,01	277.898.336
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	59.180.000	0	0	59.180.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.740.000	86.460.000	42,86	115.280.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.740.000	86.460.000	42,86	115.280.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	165.340.000	32.490.000	19,65	132.850.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.160.000	32.490.000	27,50	85.670.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	47.180.000	0	0	47.180.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.430.000	53.100.000	48,97	55.330.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.430.000	53.100.000	48,97	55.330.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.755.000	86.759.160	34,60	163.995.840
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	213.598.000	86.759.160	40,62	126.838.840
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.157.000	0	0	37.157.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.250.000	9.772.773	19,45	40.477.227
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.250.000	9.772.773	19,45	40.477.227
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.232.000	24.412	1,98	1.207.588
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.106.000	24.412	2,21	1.081.588
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	126.000	0	0	126.000
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.000.000	157.011.529	29,68	371.988.471
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	507.000.000	157.011.529	30,97	349.988.471
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.000.000	0	0	22.000.000
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.700.000	3.524.325	27,75	9.175.675
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.200.000	3.524.325	31,47	7.675.675
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.000.000	10.573.091	28,58	26.426.909

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.500.000	10.573.091	31,56	22.926.909
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.500.000	0	0	3.500.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.975.485.000	3.275.035.168	41,06	4.700.449.832
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.975.485.000	3.275.035.168	41,06	4.700.449.832
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.975.485.000	3.275.035.168	41,06	4.700.449.832
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	515.640.000	184.450.000	35,77	331.190.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	515.640.000	184.450.000	35,77	331.190.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.840.000	170.850.000	35,98	303.990.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000	13.600.000	33,33	27.200.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	6.006.618.086	31,96	12.786.306.914
5.1.2.1	Belanja Barang	4.131.272.000	1.122.359.080	27,17	3.008.912.920
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.131.272.000	1.122.359.080	27,17	3.008.912.920
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	98.425.500	32,81	201.574.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	0	0	6.800.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000	0	0	50.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	357.326.000	184.247.180	51,56	173.078.820
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	335.571.000	142.432.400	42,44	193.138.600
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	9.550.000	40,45	14.060.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	25.659.000	51,32	24.341.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.000.000	0	0	10.000.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.750.000	16.560.000	46,32	19.190.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.486.975.000	639.235.000	42,99	847.740.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	6.250.000	20,83	23.750.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	8.109.409.000	2.312.971.232	28,52	5.796.437.768
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	6.943.487.000	2.005.179.757	28,88	4.938.307.243
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.600.000	158.000.000	42,52	213.600.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.819.570.000	1.215.630.000	25,22	3.603.940.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	31.925.000	41,67	44.695.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	64.425.000	41,67	90.195.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	0	0	7.650.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000	123.530.025	45,25	149.469.975
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	548.037.000	233.673.682	42,64	314.363.318
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	14.250.000	41,67	19.950.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.515.000	15.200.000	44,04	19.315.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	19.472.522	16,26	100.302.478
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	3.336.500	16,68	16.663.500
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	111.053.028	25,53	323.946.972
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	7.500.000	40,43	11.050.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	7.184.000	23,67	23.166.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	271.732.000	46.935.331	17,27	224.796.669
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.223.000	42.619.263	40,50	62.603.737
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.116.000	1.918.283	37,50	3.197.717
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.393.000	2.397.785	37,51	3.995.215
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	11.250.000	62,50	6.750.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	11.250.000	68,18	5.250.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000	192.441.144	40,51	282.558.856
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	245.000.000	192.441.144	78,55	52.558.856
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	285.000.000	18.000.000	6,32	267.000.000
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan	160.000.000	18.000.000	11,25	142.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Bantuan Teknik				
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	125.000.000	0	0	125.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	719.650.000	261.728.000	36,37	457.922.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.650.000	157.128.000	33,46	312.522.000
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	13.468.000	81,62	3.032.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.650.000	86.710.000	31,01	192.940.000
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	0	0	20.000.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	25.320.000	57,81	18.480.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	31.630.000	45,19	38.370.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	104.600.000	41,84	145.400.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	104.600.000	41,84	145.400.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.832.594.000	2.309.559.774	39,60	3.523.034.226
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.582.594.000	2.309.559.774	41,37	3.273.034.226
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.582.594.000	2.309.559.774	41,37	3.273.034.226
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	10.897.000.000	39,48	16.703.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.600.000.000	10.897.000.000	39,48	16.703.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	10.897.000.000	39,48	16.703.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	10.897.000.000	39,48	16.703.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.383.450.000	359.598.800	25,99	1.023.851.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.212.000.000	299.880.800	24,74	912.119.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.000.000	299.880.800	83,07	61.119.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	225.000.000	163.928.000	72,86	61.072.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	353.100.000	0	0	353.100.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000	59.718.000	35,13	110.282.000
	Jumlah Belanja	64.246.353.000	23.081.103.508	35,93	41.165.249.492
	Surplus/(Defisit)	0	(23.081.103.508)	100	23.081.103.508
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(23.081.103.508)	100	23.081.103.508

Semarang, 31 Mei 2024

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVAADIWIDANTO, S.Hut,MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan realisasi sebesar Rp. 22.721.504.708,- dengan Presentasi 36.14 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 18.792.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.006.618.086,- dengan Presentasi 31.96%. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 27.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.897.000.000,- dengan Presentasi 39.48 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal mengalokasikan sebesar Rp. 1.383.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 359.598.800,- dengan Presentasi 25.99 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.212.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 299.880.800,- dengan Presentasi 24.74%; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 59.718.000,- dengan Presentasi 35.13 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD
Fungsi
Sub Fungsi
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.) 3	(Rp.) 4	(Rp.) 5	Kou (%) 6
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	21.545.469.859	41.815.883.141	33,54
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.971.353.000	8.097.071.011	13.874.281.989	36,85
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.000.000	391.428.792	642.571.208	37,86
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000	282.204.990	317.795.010,00	47,03
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.000.000	109.223.802	324.776.198,00	25,17
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.970.338.000	5.908.915.282	9.061.422.718	39,47
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	5.633.436.622	8.640.901.378,00	39,47
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	221.671.960	383.628.040,00	36,62
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	29.589.000	20.411.000,00	59,18
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	15.225.000	10.475.000,00	59,24
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	4.048.000	5.952.000,00	40,48
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	7.643.000	172.357.000	4,25
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	5.893.000	4.107.000,00	58,93
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	1.000.000	9.000.000,00	10,00
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	750.000	4.250.000,00	15,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	57.678.000	127.562.000	31,14
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	8.963.000	21.037.000,00	29,88
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	9.550.000	20.450.000,00	31,83
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	39.165.000	10.835.000,00	78,33
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.990.000.000	543.391.870	1.446.608.130	27,31
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	25.659.000	24.341.000,00	51,32
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	39.201.500	35.798.500,00	52,27
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	7.760.000	12.240.000,00	38,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	98.425.500	201.574.500,00	32,81
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	18.413.000	6.587.000,00	73,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	7.500.000	12.500.000,00	37,50
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	6.250.000	23.750.000,00	20,83
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	254.029.910	815.970.090,00	23,74
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsp Dinamis pada SKPD	100.000.000	26.400.000	73.600.000,00	26,40
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000	59.752.960	240.247.040,00	19,92
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	299.880.800	852.119.200	26,03
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	165.000.000	163.928.000	1.072.000,00	99,35
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	987.000.000	135.952.800	851.047.200,00	13,77

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.775.000	619.221.267	1.090.553.733	36,22
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	75.712.270	109.287.730,00	40,93
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	133.862.050	440.912.950,00	23,29
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.000.000	409.646.947	540.353.053,00	43,12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	268.912.000	481.088.000	35,85
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	12.003.000	37.997.000,00	24,01
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	81.891.000	178.109.000,00	31,50
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	31.630.000	38.370.000,00	45,19
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	143.388.000	206.612.000,00	40,97
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000	11.929.038.178	22.987.961.822	34,16
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	425.000.000	193.088.073	231.911.927	45,43
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	325.000.000	150.675.049	174.324.951,00	46,36
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	42.413.024	57.586.976,00	42,41
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	54.424.120	125.575.880	30,24
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	21.510.485	78.489.515,00	21,51
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	32.913.635	47.086.365,00	41,14
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	32.182.000.000	10.886.319.685	21.275.680.335	33,85
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.330.000.000	1.554.159.120	2.775.840.880,00	35,89
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.832.000.000	9.332.160.545	18.499.839.455,00	33,53
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	795.206.320	1.354.793.680	36,99
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	795.206.320	1.354.793.680,00	36,99
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000	576.179.243	2.366.820.757	19,58
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	25.225.000	59.775.000	29,68
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	25.225.000	59.775.000,00	29,68
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.858.000.000	550.954.243	2.307.045.757	19,28
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	270.000.000	166.484.929	103.515.071,00	61,66
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	30.015.890	69.984.110,00	30,02
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.488.000.000	354.453.424	2.133.546.576,00	14,25
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	163.804.760	1.561.195.240	9,50
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.725.000.000	163.804.760	1.561.195.240	9,50
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.620.000.000	124.861.200	1.495.138.800,00	7,71
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	38.943.560	66.056.440,00	37,09

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
1	2	(Rp.) 3	(Rp.) 4	(Rp.) 5	Kou (%) 6
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	164.873.960	235.126.040	41,22
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	400.000.000	164.873.960	235.126.040	41,22
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	400.000.000	164.873.960	235.126.040,00	41,22
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	284.265.560	315.734.440	47,38
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	284.265.560	315.734.440	47,38
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	120.383.960	129.616.040,00	48,15
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	163.881.600	186.118.400,00	46,82
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	264.958.980	325.041.020	44,91
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	264.958.980	325.041.020	44,91
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	163.460.000	73.480.000	89.980.000,00	44,95
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	426.540.000	191.478.980	235.061.020,00	44,89
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	65.278.167	149.721.833	30,36
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	65.278.167	149.721.833	30,36
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dan Kualifikasi Menengah	215.000.000	65.278.167	149.721.833,00	30,36
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000	325.633.649	559.366.351	36,79
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	885.000.000	325.633.649	559.366.351	36,79
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	69.238.498	145.761.502,00	32,20
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	670.000.000	256.395.151	413.604.849,00	38,27
	JUMLAH	64.246.353.000	21.871.103.508	42.375.249.492	34,04



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN APRIL

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan April pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, April 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan April sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, April 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratraktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “.

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.

* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 30 April 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	15.249.597.438	23,74	48.996.755.562
5.1	BELANJA OPERASI	62.862.903.000	15.113.644.638	24,04	47.749.258.362
5.1.1	Belanja Pegawai	14.789.978.000	4.836.235.981	32,70	9.953.742.019
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.853.000	1.959.121.684	31,10	4.339.731.316
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.448.955.000	1.467.373.400	32,98	2.981.581.600
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.026.253.000	1.467.373.400	36,45	2.558.879.600
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	422.702.000	0	0	422.702.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	493.451.000	130.204.442	26,39	363.246.558
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.271.000	130.204.442	29,98	304.066.558
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	59.180.000	0	0	59.180.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.740.000	72.050.000	35,71	129.690.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.740.000	72.050.000	35,71	129.690.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	165.340.000	27.075.000	16,38	138.265.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.160.000	27.075.000	22,91	91.085.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	47.180.000	0	0	47.180.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.430.000	44.250.000	40,81	64.180.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.430.000	44.250.000	40,81	64.180.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.755.000	72.275.160	28,82	178.479.840
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	213.598.000	72.275.160	33,84	141.322.840
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.157.000	0	0	37.157.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.250.000	9.058.968	18,03	41.191.032
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.250.000	9.058.968	18,03	41.191.032
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.232.000	20.290	1,65	1.211.710
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.106.000	20.290	1,83	1.085.710
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	126.000	0	0	126.000
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.000.000	125.548.427	23,73	403.451.573
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	507.000.000	125.548.427	24,76	381.451.573
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.000.000	0	0	22.000.000
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.700.000	2.816.477	22,18	9.883.523
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.200.000	2.816.477	25,15	8.383.523
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.000.000	8.449.520	22,84	28.550.480
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.500.000	8.449.520	25,22	25.050.480

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.500.000	0	0	3.500.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.975.485.000	2.729.554.297	34,22	5.245.930.703
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.975.485.000	2.729.554.297	34,22	5.245.930.703
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.975.485.000	2.729.554.297	34,22	5.245.930.703
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	515.640.000	147.560.000	28,62	368.080.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	515.640.000	147.560.000	28,62	368.080.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.840.000	136.680.000	28,78	338.160.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000	10.880.000	26,67	29.920.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	4.681.408.657	24,91	14.111.516.343
5.1.2.1	Belanja Barang	4.131.272.000	925.054.050	22,39	3.206.217.950
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.131.272.000	925.054.050	22,39	3.206.217.950
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	98.425.500	32,81	201.574.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	0	0	6.800.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000	0	0	50.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	357.326.000	158.686.150	44,41	198.639.850
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	335.571.000	122.016.400	36,36	213.554.600
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	7.750.000	32,83	15.860.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	19.865.000	39,73	30.135.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.000.000	0	0	10.000.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.750.000	15.380.000	43,02	20.370.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.486.975.000	500.431.000	33,65	986.544.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	2.500.000	8,33	27.500.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	8.109.409.000	1.732.204.213	21,36	6.377.204.787
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	6.943.487.000	1.520.670.440	21,90	5.422.816.560
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.600.000	114.800.000	30,89	256.800.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.819.570.000	893.605.000	18,54	3.925.965.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	25.540.000	33,33	51.080.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	51.540.000	33,33	103.080.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	0	0	7.650.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000	98.530.425	36,09	174.469.575
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	548.037.000	188.782.892	34,45	359.254.108
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	11.400.000	33,33	22.800.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pementasan	34.515.000	14.100.000	40,85	20.415.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	15.580.620	13,01	104.194.380
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	2.559.700	12,80	17.440.300
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	93.765.803	21,56	341.234.197
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	6.000.000	32,35	12.550.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	4.466.000	14,71	25.884.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	271.732.000	38.864.141	14,30	232.867.859
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.223.000	35.372.021	33,62	69.850.979
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.116.000	1.552.078	30,34	3.563.922
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.393.000	1.940.042	30,35	4.452.958
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	8.250.000	45,83	9.750.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	8.250.000	50	8.250.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000	113.254.632	23,84	361.745.368
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	245.000.000	113.254.632	46,23	131.745.368
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	285.000.000	12.000.000	4,21	273.000.000
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000	12.000.000	7,50	148.000.000
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	125.000.000	0	0	125.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	719.650.000	206.518.000	28,70	513.132.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.650.000	126.798.000	27	342.852.000
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	10.028.000	60,78	6.472.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.650.000	66.560.000	23,80	213.090.000
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	0	0	20.000.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	25.320.000	57,81	18.480.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	24.890.000	35,56	45.110.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	79.720.000	31,89	170.280.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	79.720.000	31,89	170.280.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.832.594.000	1.817.632.394	31,16	4.014.961.606
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.582.594.000	1.817.632.394	32,56	3.764.961.606
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.582.594.000	1.817.632.394	32,56	3.764.961.606
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	5.596.000.000	20,28	22.004.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.600.000.000	5.596.000.000	20,28	22.004.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	5.596.000.000	20,28	22.004.000.000
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	5.596.000.000	20,28	22.004.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.383.450.000	135.952.800	9,83	1.247.497.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.212.000.000	135.952.800	11,22	1.076.047.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.000.000	135.952.800	37,66	225.047.200

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.000.000	135.952.800	37,66	225.047.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	225.000.000	0	0	225.000.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	353.100.000	0	0	353.100.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000	0	0	170.000.000
	Jumlah Belanja	64.246.353.000	15.249.597.438	23,74	48.996.755.562
	Surplus/(Defisit)	0	(15.249.597.438)	100	15.249.597.438
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(15.249.597.438)	100	15.249.597.438

Semarang, 30 April 2024

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.113.664.638,- dengan Presentasi 24.04 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 18.792.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.681.408.657,- dengan Presentasi 24.91 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 27.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.596.000.000,- dengan Presentasi 20.28 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 1.383.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 135.952.800,- dengan Presentasi 9.83 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.212.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 135.952.800,- dengan Presentasi 11.22 %; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut, strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD
Fungsi
Sub Fungsi
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kau (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	14.987.615.238	48.373.737.762	23,33
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.971.353.000	6.622.248.689	15.349.104.311	30,14
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.000.000	348.445.628	685.554.372	32,93
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000	261.645.658	338.354.342,00	43,61
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.000.000	78.799.970	355.200.030,00	18,16
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.970.338.000	4.912.734.809	10.057.603.191	32,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	4.688.675.981	9.585.662.019,00	32,85
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	177.394.128	427.905.872,00	29,31
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	22.447.000	27.553.000,00	44,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	15.225.000	10.475.000,00	59,24
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	4.048.000	5.952.000,00	40,48
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	5.935.500	174.064.500	3,30
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	4.185.500	5.814.500,00	41,86
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	1.000.000	9.000.000,00	10,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	750.000	4.250.000,00	15,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	57.678.000	127.562.000	31,14
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Alirbul Kekongkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	8.963.000	21.037.000,00	29,88
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	9.550.000	20.450.000,00	31,83
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	39.165.000	10.835.000,00	78,33
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.990.000.000	456.717.688	1.533.282.312	22,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	19.865.000	30.135.000,00	39,73
	Sub Kegiatan Penyediaan Perakatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	33.469.500	41.530.500,00	44,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Perakatan Rumah Tangga	20.000.000	6.580.000	13.420.000,00	32,90
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	98.425.500	201.574.500,00	32,81
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	16.865.000	8.135.000,00	67,46
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Barasan dan Perakatan Perundang-undangan	20.000.000	6.000.000	14.000.000,00	30,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	2.500.000	27.500.000,00	8,33
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	200.177.560	869.822.440,00	18,71
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	23.900.000	76.100.000,00	23,90
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000	48.935.128	251.064.872,00	16,31
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	135.952.800	1.016.047.200	11,80
	Sub Kegiatan Pengadaan Mobil	165.000.000	-	165.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Perakatan dan Mesin Lainnya	987.000.000	135.952.800	851.047.200,00	13,77
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.775.000	501.808.264	1.207.974.736	29,35
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	60.426.048	124.573.952,00	32,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	111.906.123	462.868.877,00	19,47
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.000.000	329.468.093	620.531.907,00	34,68
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	210.984.000	539.016.000	28,13
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	12.003.000	37.997.000,00	24,01
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	59.023.000	200.977.000,00	22,70
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	24.890.000	45.110.000,00	35,56
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	115.068.000	234.932.000,00	32,88
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000	7.271.457.405	27.645.542.595	20,82
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	425.000.000	166.591.397	258.408.603	39,16
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	325.000.000	128.916.049	196.083.951,00	39,67
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	37.585.348	62.414.652,00	37,59
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	188.000.000	35.438.293	144.561.707	19,89
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukukawadn Tanggapi Bencana	100.000.000	17.033.684	82.966.316,00	17,03
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	18.402.609	61.597.391,00	23,00

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kau (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	32.162.000.000	8.497.106.818	25.664.893.982	20,20
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.330.000.000	1.064.001.944	3.265.998.056,00	24,57
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.832.000.000	5.433.104.074	22.398.895.926,00	19,52
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	572.413.697	1.577.586.303	26,62
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	572.413.697	1.577.586.303,00	26,62
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000	368.505.708	2.574.494.292	12,52
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	20.209.000	64.791.000	23,78
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	20.209.000	64.791.000,00	23,78
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.858.000.000	348.296.708	2.509.703.292	12,19
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	270.000.000	88.228.597	181.771.403,00	32,68
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	25.629.615	74.370.385,00	25,63
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.488.000.000	234.438.496	2.253.561.504,00	9,42
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	137.136.328	1.587.863.672	7,95
	Kegiatan Usulan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.725.000.000	137.136.328	1.587.863.672	7,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.620.000.000	105.284.200	1.514.715.800,00	6,50
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	31.852.128	73.147.872,00	30,34
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	119.592.128	280.407.872	29,90
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	400.000.000	119.592.128	280.407.872	29,90
	Sub Kegiatan Pembentahan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	400.000.000	119.592.128	280.407.872,00	29,90
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	220.133.728	379.866.272	36,69
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	220.133.728	379.866.272	36,69
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Pertara Portanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	98.180.128	151.819.872,00	39,27
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	121.953.600	228.046.400,00	34,84
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	206.225.064	383.774.936	34,95
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	206.225.064	383.774.936	34,95
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	163.460.000	69.160.000	94.300.000,00	42,31
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	426.540.000	137.065.064	289.474.936,00	32,13
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	42.316.188	172.683.812	19,68
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	42.316.188	172.683.812	19,68
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kualifikasi Menengah	215.000.000	42.316.188	172.683.812,00	19,68
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000	261.982.200	623.017.800	29,60
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	885.000.000	261.982.200	623.017.800	29,60
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	56.174.580	158.825.420,00	26,13
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	670.000.000	205.807.620	464.192.380,00	30,72
	JUMLAH	64.246.353.000	15.249.597.438	48.996.755.562	23,74



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN MARET

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Maret pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Maret 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan Maret sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang,

Maret 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Selaku

Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infrastruktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “.

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.

* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 31 Maret 2024

Kode	Uralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	8.977.311.273	13,97	55.269.041.727
5.1	BELANJA OPERASI	62.862.903.000	8.841.358.473	14,06	54.021.544.527
5.1.1	Belanja Pegawai	14.789.978.000	3.278.747.091	22,17	11.511.230.909
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.853.000	1.559.492.506	24,76	4.739.360.494
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.448.955.000	1.172.369.400	26,35	3.276.585.600
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.026.253.000	1.172.369.400	29,12	2.853.883.600
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	422.702.000	0	0	422.702.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	493.451.000	104.007.080	21,08	389.443.920
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.271.000	104.007.080	23,95	330.263.920
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	59.180.000	0	0	59.180.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.740.000	57.640.000	28,57	144.100.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.740.000	57.640.000	28,57	144.100.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	165.340.000	21.660.000	13,10	143.680.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.160.000	21.660.000	18,33	96.500.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	47.180.000	0	0	47.180.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.430.000	35.400.000	32,65	73.030.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.430.000	35.400.000	32,65	73.030.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.755.000	57.791.160	23,05	192.963.840
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	213.598.000	57.791.160	27,06	155.806.840
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.157.000	0	0	37.157.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.250.000	8.345.163	16,61	41.904.837
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.250.000	8.345.163	16,61	41.904.837
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.232.000	16.136	1,31	1.215.864
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.106.000	16.136	1,46	1.089.864
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	126.000	0	0	126.000
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.000.000	93.829.603	17,74	435.170.397
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	507.000.000	93.829.603	18,51	413.170.397
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.000.000	0	0	22.000.000
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.700.000	2.108.475	16,60	10.591.525
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.200.000	2.108.475	18,83	9.091.525
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.000.000	6.325.489	17,10	30.674.511
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.500.000	6.325.489	18,88	27.174.511

Code	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.500.000	0	0	3.500.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.975.485.000	1.608.584.585	20,17	6.366.900.415
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.975.485.000	1.608.584.585	20,17	6.366.900.415
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.975.485.000	1.608.584.585	20,17	6.366.900.415
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	515.640.000	110.670.000	21,46	404.970.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	515.640.000	110.670.000	21,46	404.970.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.840.000	102.510.000	21,59	372.330.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000	8.160.000	20	32.640.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	3.530.611.382	18,79	15.262.313.618
5.1.2.1	Belanja Barang	4.131.272.000	727.540.960	17,61	3.403.731.040
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.131.272.000	727.540.960	17,61	3.403.731.040
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	73.660.500	24,55	226.339.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	0	0	6.800.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000	0	0	50.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	357.326.000	131.269.960	36,74	226.056.040
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	335.571.000	105.035.500	31,30	230.535.500
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	6.250.000	26,47	17.360.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	15.701.000	31,40	34.299.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	10.000.000	0	0	10.000.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.750.000	14.280.000	39,94	21.470.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.486.975.000	381.344.000	25,65	1.105.631.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	8.109.409.000	1.216.883.342	15,01	6.892.525.658
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	6.943.487.000	1.134.328.929	16,34	5.809.158.071
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.600.000	111.800.000	30,09	259.800.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.819.570.000	627.855.000	13,03	4.191.715.000

kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	19.155.000	25	57.465.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	38.655.000	25	115.965.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	0	0	7.650.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000	76.012.165	27,84	196.987.835
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	548.037.000	143.892.102	26,26	404.144.898
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	8.550.000	25	25.650.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.515.000	13.950.000	40,42	20.565.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	11.706.850	9,77	108.068.150
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	1.782.900	8,91	18.217.100
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	72.003.912	16,55	362.996.088
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	4.500.000	24,26	14.050.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	4.466.000	14,71	25.884.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	271.732.000	29.139.413	10,72	242.592.587
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.223.000	26.521.811	25,21	78.701.189
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.116.000	1.163.397	22,74	3.952.603
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.393.000	1.454.205	22,75	4.938.795
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	8.250.000	45,83	9.750.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	8.250.000	50	8.250.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000	0	0	475.000.000
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	245.000.000	0	0	245.000.000
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	285.000.000	6.000.000	2,11	279.000.000
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000	6.000.000	3,75	154.000.000
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	125.000.000	0	0	125.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	39.165.000	99,94	25.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	719.650.000	155.422.000	21,60	564.228.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.650.000	96.402.000	20,53	373.248.000
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	10.028.000	60,78	6.472.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.650.000	45.659.000	16,33	233.991.000
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	0	0	20.000.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	21.235.000	48,48	22.565.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	19.480.000	27,83	50.520.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	59.020.000	23,61	190.980.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	59.020.000	23,61	190.980.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.832.594.000	1.430.765.080	24,53	4.401.828.920
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.582.594.000	1.430.765.080	25,63	4.151.828.920
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	5.582.594.000	1.430.765.080	25,63	4.151.828.920
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Blasa-Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	2.032.000.000	7,36	25.568.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.600.000.000	2.032.000.000	7,36	25.568.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	2.032.000.000	7,36	25.568.000.000
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	2.032.000.000	7,36	25.568.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.383.450.000	135.952.800	9,83	1.247.497.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.212.000.000	135.952.800	11,22	1.076.047.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.000.000	135.952.800	37,66	225.047.200

Node	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.000.000	135.952.800	37,66	225.047.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	225.000.000	0	0	225.000.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	353.100.000	0	0	353.100.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000	0	0	170.000.000
	Jumlah Belanja	64.246.353.000	8.977.311.273	13,97	55.269.041.727
	Surplus/(Defisit)	0	(8.977.311.273)	100	8.977.311.273
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(8.977.311.273)	100	8.977.311.273

Semarang, 31 Maret 2024

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.841.358.473,- dengan Presentasi 14.06 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 18.792.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.530.611.382,- dengan Presentasi 18.79 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 27.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.032.000.000,- dengan Presentasi 7.36 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 1.383.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 135.952.800,- dengan Presentasi 9.83 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.212.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 135.952.800,- dengan Presentasi 11.22 %; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD :
 Fungsional :
 Sub Fungsional :
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
1	2	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kem (%)
3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH	64.248.392.000	8.804.292.829	64.967.199.371	13,70
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.971.392.000	4.719.000.274	17.263.392.726	21,47
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.024.000.000	308.302.144	727.697.856	29,82
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000	241.292.709	358.737.294,00	40,21
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	424.000.000	65.039.438	358.960.562,00	14,99
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.870.328.000	3.341.788.287	11.828.549.813	22,32
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	3.169.077.091	11.106.260.909,00	22,19
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	133.045.560	472.254.404,00	21,98
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	16.428.000	33.572.000,00	32,86
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	15.225.000	10.475.000,00	59,24
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	4.048.000	5.952.000,00	40,48
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	6.185.500	174.814.500	2,88
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	4.185.500	5.814.500,00	41,86
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	1.000.000	9.000.000,00	10,00
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	5.000.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	188.240.000	66.452.000	128.788.000	30,48
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	30.000.000	7.737.000	22.263.000,00	25,79
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	9.950.000	20.050.000,00	33,17
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	39.165.000	10.835.000,00	78,33
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.890.000.000	328.980.298	1.661.019.804	16,58
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	15.701.000	34.299.000,00	31,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	26.233.500	48.766.500,00	34,98
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	5.480.000	14.520.000,00	27,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	73.660.500	226.339.500,00	24,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	15.550.000	9.450.000,00	62,20
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	4.500.000	15.500.000,00	22,50
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	-	30.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	130.028.800	939.973.200,00	12,15
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	20.650.000	79.350.000,00	20,65
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000	38.178.596	261.821.404,00	12,73
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	136.962.800	1.016.047.200	11,80
	Sub Kegiatan Pengadaan Mobil	165.000.000	-	165.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	987.000.000	136.962.800	850.047.200,00	13,77
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.775.000	282.471.047	1.427.303.953	22,27
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	45.307.036	139.692.964,00	24,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	85.493.662	489.281.338,00	14,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.000.000	251.670.349	698.329.651,00	26,49
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	159.888.000	590.112.000	21,32
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	7.502.000	42.498.000,00	15,00
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	42.623.000	217.377.000,00	16,39
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mobil	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	19.480.000	50.520.000,00	27,83
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	90.283.000	259.717.000,00	25,80
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000	3.280.912.791	31.636.087.209	9,34
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	425.800.000	127.808.115	297.991.885	29,88
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	325.000.000	97.669.743	227.330.257,00	30,05
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	29.338.372	70.661.628,00	29,34
	Kegiatan Sosialisasi dan Peralihan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	188.900.000	22.967.911	165.932.089	12,22
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	12.256.328	87.743.672,00	12,26
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	11.711.583	68.288.417,00	14,65

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	32.162.000.000	2.719.543.946	29.442.456.054	8,48
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.330.000.000	96.962.768	4.233.037.232,00	2,24
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.832.000.000	2.622.581.178	25.209.418.822,00	9,42
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	389.493.819	1.760.506.181	18,12
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	389.493.819	1.760.506.181,00	18,12
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000	292.717.794	2.650.282.206	9,95
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	20.209.000	64.791.000	23,78
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	20.209.000	64.791.000,00	23,78
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.858.000.000	272.508.794	2.585.491.206	9,53
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	270.000.000	65.565.065	204.434.935,00	24,28
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	17.986.931	82.013.069,00	17,99
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.488.000.000	188.956.798	2.299.043.202,00	7,59
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	42.634.346	1.682.365.654	2,47
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.725.000.000	42.634.346	1.682.365.654	2,47
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.620.000.000	19.351.500	1.600.648.500,00	1,19
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	23.282.846	81.717.154,00	22,17
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	76.893.596	323.106.404	19,22
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	400.000.000	76.893.596	323.106.404	19,22
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	400.000.000	76.893.596	323.106.404,00	19,22
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	195.251.196	404.748.804	32,54
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	195.251.196	404.748.804	32,54
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	80.116.596	169.883.404,00	32,05
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	115.134.600	234.865.400,00	32,90
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	181.295.798	408.704.202	30,73
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	181.295.798	408.704.202	30,73
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	163.460.000	58.000.000	105.460.000,00	35,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	426.540.000	123.295.798	303.244.202,00	28,91
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	37.445.834	177.554.166	17,42
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	37.445.834	177.554.166	17,42
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kualifikasi Menengah	215.000.000	37.445.834	177.554.166,00	17,42
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000	173.058.644	711.941.356	19,55
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	885.000.000	173.058.644	711.941.356	19,55
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	43.512.812	171.487.188,00	20,24
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	670.000.000	129.545.832	540.454.168,00	19,34
	JUMLAH	64.248.353.000	8.977.311.273	55.269.041.727	13,97



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN FEBRUARI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Februari pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Februari 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan Februari sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang,

Februari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah

Selaku

Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infrastuktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “.

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.

* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 29 Februari 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	4.205.239.937	6,55	60.041.113.063
5.1	BELANJA OPERASI	62.862.903.000	4.069.287.137	6,47	58.793.615.863
5.1.1	Belanja Pegawai	14.789.978.000	1.888.432.533	12,77	12.901.545.467
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.853.000	743.226.619	11,80	5.555.626.381
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.448.955.000	542.120.400	12,19	3.906.834.600
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.026.253.000	542.120.400	13,46	3.484.132.600
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	422.702.000	0	0	422.702.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	493.451.000	48.102.528	9,75	445.348.472
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.271.000	48.102.528	11,08	386.168.472
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	59.180.000	0	0	59.180.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.740.000	28.820.000	14,29	172.920.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.740.000	28.820.000	14,29	172.920.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	165.340.000	10.830.000	6,55	154.510.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.160.000	10.830.000	9,17	107.330.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	47.180.000	0	0	47.180.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.430.000	17.700.000	16,32	90.730.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.430.000	17.700.000	16,32	90.730.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.755.000	28.823.160	11,49	221.931.840
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	213.598.000	28.823.160	13,49	184.774.840
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.157.000	0	0	37.157.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.250.000	779.150	1,55	49.470.850
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.250.000	779.150	1,55	49.470.850
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.232.000	7.856	0,64	1.224.144
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.106.000	7.856	0,71	1.098.144
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	126.000	0	0	126.000
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.000.000	60.839.158	11,50	468.160.842
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	507.000.000	60.839.158	12	446.160.842
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.000.000	0	0	22.000.000
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.700.000	1.301.097	10,24	11.398.903
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.200.000	1.301.097	11,62	9.898.903
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.000.000	3.903.270	10,55	33.096.730
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.500.000	3.903.270	11,65	29.596.730
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.500.000	0	0	3.500.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.975.485.000	1.071.425.914	13,43	6.904.059.086
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.975.485.000	1.071.425.914	13,43	6.904.059.086
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.975.485.000	1.071.425.914	13,43	6.904.059.086
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	515.640.000	73.780.000	14,31	441.860.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	515.640.000	73.780.000	14,31	441.860.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.840.000	68.340.000	14,39	406.500.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000	5.440.000	13,33	35.360.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	2.180.854.604	11,60	16.612.070.396
5.1.2.1	Belanja Barang	4.131.272.000	489.914.330	11,86	3.641.357.670
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.131.272.000	489.914.330	11,86	3.641.357.670
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	47.731.500	15,91	252.268.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	0	0	6.800.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000	0	0	50.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	357.326.000	91.569.330	25,63	265.756.670
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	335.571.000	54.327.500	16,19	281.243.500
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	4.250.000	18	19.360.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	10.010.000	20,02	39.990.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.000.000	0	0	10.000.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.750.000	3.780.000	10,57	31.970.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.486.975.000	278.246.000	18,71	1.208.729.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakailan Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	8.109.409.000	734.214.106	9,05	7.375.194.894
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	6.943.487.000	708.834.453	10,21	6.234.652.547
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.600.000	52.700.000	14,18	318.900.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.819.570.000	390.385.000	8,10	4.429.185.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	12.770.000	16,67	63.850.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	25.770.000	16,67	128.850.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	0	0	7.650.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000	49.192.140	18,02	223.807.860
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	548.037.000	99.001.312	18,06	449.035.688
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	5.700.000	16,67	28.500.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.515.000	7.450.000	21,58	27.065.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	7.841.239	6,55	111.933.761
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	1.188.600	5,94	18.811.400
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	49.370.162	11,35	385.629.838
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	3.000.000	16,17	15.550.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	4.466.000	14,71	25.884.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Auransi	271.732.000	19.379.653	7,13	252.352.347
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.223.000	17.671.601	16,79	87.551.399

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.116.000	759.148	14,84	4.356.854
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.393.000	948.906	14,84	5.444.094
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	6.000.000	33,33	12.000.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	6.000.000	36,36	10.500.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000	0	0	475.000.000
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	245.000.000	0	0	245.000.000
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	285.000.000	0	0	285.000.000
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000	0	0	160.000.000
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	125.000.000	0	0	125.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	0	0	39.190.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	0	0	39.190.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	719.650.000	103.359.000	14,36	616.291.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.650.000	66.239.000	14,10	403.411.000
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	5.609.000	33,99	10.891.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.650.000	33.175.000	11,86	246.475.000
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	0	0	20.000.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	14.695.000	33,55	29.105.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	12.760.000	18,23	57.240.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	37.120.000	14,85	212.880.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	37.120.000	14,85	212.880.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.832.594.000	853.367.168	14,63	4.979.226.832
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.582.594.000	853.367.168	15,29	4.729.226.832
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.582.594.000	853.367.168	15,29	4.729.226.832
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	0	0	27.600.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.600.000.000	0	0	27.600.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	0	0	27.600.000.000
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	0	0	27.600.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.383.450.000	135.952.800	9,83	1.247.497.200
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.212.000.000	135.952.800	11,22	1.076.047.200
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.000.000	135.952.800	37,66	225.047.200
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.000.000	135.952.800	37,66	225.047.200
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	225.000.000	0	0	225.000.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	135.952.800	99,97	47.200
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	353.100.000	0	0	353.100.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000	0	0	170.000.000
	Jumlah Belanja	64.246.353.000	4.205.239.937	6,55	60.041.113.063
	Surplus/(Defisit)	0	(4.205.239.937)	100	4.205.239.937
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(4.205.239.937)	100	4.205.239.937

Semarang, 29 Februari 2024

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)

NIP. 19731113 199803 1 003

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.069.287.137,- dengan Presentasi 6.47 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 18.792.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.180.854.604,- dengan Presentasi 11.60 %. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 27.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal mengalokasikan sebesar Rp. 1.383.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 135.952.800,- dengan Presentasi 9.83 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.212.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 135.952.800,- dengan Presentasi 11.22 %; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD :
 Fungsi :
 Sub Fungsi :
 Provinsi : Jawa Tengah

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	64.248.353.000	4.109.585.348	59.251.767.651	6,40
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.971.353.000	2.851.804.606	19.119.548.394	12,98
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.000.000	231.217.080	802.782.920	22,36
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000	182.599.674	417.400.326,00	30,43
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.000.000	48.617.406	385.382.594,00	11,20
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.970.338.000	1.824.530.297	13.045.807.703	12,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	1.814.652.533	12.459.685.467,00	12,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	88.697.064	516.602.936,00	14,65
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	7.411.000	42.589.000,00	14,82
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.944.700	55.300,00	98,89
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	8.825.000	16.875.000,00	34,34
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	3.485.500	176.514.500	1,94
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	3.485.500	6.514.500,00	34,86
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	5.000.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	4.400.000	180.840.000	2,38
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alatbuk Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000,00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	1.500.000	28.500.000,00	5,00
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	2.900.000	27.100.000,00	9,67
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	50.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-	10.000.000,00	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.990.000.000	188.735.084	1.803.264.938	9,38
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	10.010.000	39.990.000,00	20,02
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	16.751.500	58.248.500,00	22,34
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	3.780.000	16.220.000,00	18,90
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	47.731.500	252.268.500,00	15,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	14.165.000	10.835.000,00	56,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	3.000.000	17.000.000,00	15,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	-	30.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	70.162.000	999.838.000,00	6,56
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	3.100.000	96.900.000,00	3,10
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000	18.035.064	281.964.936,00	6,01
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	135.952.800	1.016.047.200	11,80
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	165.000.000	-	165.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	987.000.000	135.952.800	851.047.200,00	13,77
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.775.000	257.658.885	1.452.116.135	15,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	29.688.024	155.311.976,00	16,05
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	58.400.001	516.374.999,00	10,16
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.000.000	169.570.840	780.429.160,00	17,85
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	107.825.000	642.175.000	14,38
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	5.522.000	44.478.000,00	11,04
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	32.119.000	227.881.000,00	12,35
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-	20.000.000,00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	12.760.000	57.240.000,00	18,23
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	57.424.000	292.576.000,00	16,41
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000	685.100.508	34.231.899.492	1,96
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	425.000.000	59.974.919	365.025.081	14,11
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	325.000.000	44.861.967	280.138.033,00	13,80
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	15.112.052	84.887.948,00	15,11
	Kegiatan Sosialisasi dan Peralapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	15.389.689	164.610.311	8,55
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	8.228.052	91.771.948,00	8,23
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	7.161.637	72.838.363,00	8,95

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	32.162.000.000	402.301.209	31.759.698.791	1,25
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.330.000.000	71.534.192	4.258.465.808,00	1,65
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.832.000.000	330.767.017	27.501.232.983,00	1,19
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	207.435.591	1.942.564.409	9,65
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	207.435.591	1.942.564.409,00	9,65
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000	235.054.411	2.707.945.589	7,99
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	8.867.000	76.133.000	10,43
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	8.867.000	76.133.000,00	10,43
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.858.000.000	226.187.411	2.631.812.589	7,91
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	270.000.000	41.647.532	228.352.468,00	15,43
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	8.445.247	91.554.753,00	8,45
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.488.000.000	176.094.632	2.311.905.368,00	7,08
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	31.897.064	1.693.102.936	1,85
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.725.000.000	31.897.064	1.693.102.936	1,85
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.620.000.000	17.068.500	1.602.931.500,00	1,05
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	14.828.564	90.171.436,00	14,12
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	57.070.064	342.929.936	14,27
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	400.000.000	57.070.064	342.929.936	14,27
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	400.000.000	57.070.064	342.929.936,00	14,27
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	112.691.664	487.308.336	18,78
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	112.691.664	487.308.336	18,78
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	57.365.064	192.634.936,00	22,95
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	55.326.600	294.673.400,00	15,81
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	110.736.532	479.263.468	18,77
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	110.736.532	479.263.468	18,77
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	163.460.000	44.940.000	118.520.000,00	27,49
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	426.540.000	65.796.532	360.743.468,00	15,43
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	25.230.500	189.769.500	11,74
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	25.230.500	189.769.500	11,74
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kualifikasi Menengah	215.000.000	25.230.500	189.769.500,00	11,74
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000	95.654.588	789.345.412	10,81
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	885.000.000	95.654.588	789.345.412	10,81
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	18.803.544	196.196.456,00	8,75
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	670.000.000	76.851.044	593.148.956,00	11,47
	JUMLAH	64.248.353.000	4.205.239.937	60.041.113.063	6,55



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Dari : Sekretaris Disperakim Provinsi Jawa Tengah
N o m o r : 18 /KEU/I/2024
Tanggal : 05 Februari 2024
Perihal : Permohonan Asmanan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024
Bulan Januari

Berikut kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Januari.

Bersama ini mohon dengan hormat asmanan Bapak untuk Laporan tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa.

SEKRETARIS

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19731113 199803 1 003



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN JANUARI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Bulan Januari pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di bulan yang akan datang.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Januari 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran


Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

JL. MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP. (024) 7608202 – 7600247- 7608434

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 bulan Januari sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran

Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.
NIP. 19660801 199603 1 004.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sitimatis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada anggaran pendapatan .

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang digunakan untuk kegiatan bersifat rutin dan pembangunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat meliputi ekonomi, sosial budaya pemerintah dan fisik infratraktur, sesuai dengan visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi “.

* Bidang Ekonomi meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah guna mendukung program Pembangunan wilayah provinsi jawa tengah yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya jawa tengah secara efisiensi, efektif dan berkeadilan.

* Bidang Sosial budaya pemerintah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terbuka dan harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten / kota, memperkuat sistem pelayanan secara cepat, transparan dan berinteraksi, pemantapan kondusif wilayah serta demokratisasi wawasan berkebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA. Dalam mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program-program adalah ;

1. Program Pengembangan Perumahan.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 31 Januari 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	1.815.673.385	2,83	62.430.679.615
5.1	BELANJA OPERASI	62.862.903.000	1.815.673.385	2,89	61.047.229.615
5.1.1	Belanja Pegawai	14.789.978.000	904.276.375	6,11	13.885.701.625
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.298.853.000	368.563.418	5,85	5.930.289.582
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.448.955.000	268.274.500	6,03	4.180.680.500
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.026.253.000	268.274.500	6,66	3.757.978.500
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	422.702.000	0	0	422.702.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	493.451.000	24.117.676	4,89	469.333.324
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.271.000	24.117.676	5,55	410.153.324
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	59.180.000	0	0	59.180.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.740.000	14.410.000	7,14	187.330.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.740.000	14.410.000	7,14	187.330.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	165.340.000	5.415.000	3,28	159.925.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	118.160.000	5.415.000	4,58	112.745.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	47.180.000	0	0	47.180.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.430.000	8.665.000	7,99	99.765.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.430.000	8.665.000	7,99	99.765.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.755.000	14.411.580	5,75	236.343.420
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	213.598.000	14.411.580	6,75	199.186.420
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.157.000	0	0	37.157.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.250.000	389.575	0,78	49.860.425
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.250.000	389.575	0,78	49.860.425
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.232.000	3.885	0,32	1.228.115
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.106.000	3.885	0,35	1.102.115
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	126.000	0	0	126.000
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	529.000.000	30.300.761	5,73	498.699.239
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	507.000.000	30.300.761	5,98	476.699.239
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.000.000	0	0	22.000.000
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.700.000	643.863	5,07	12.056.137
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.200.000	643.863	5,75	10.556.137
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.000.000	1.931.578	5,22	35.068.422
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.500.000	1.931.578	5,77	31.568.422

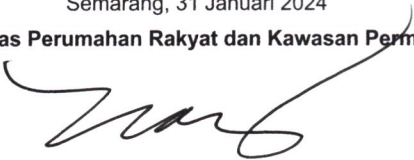
Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11.2	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	3.500.000	0	0	3.500.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.975.485.000	535.712.957	6,72	7.439.772.043
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.975.485.000	535.712.957	6,72	7.439.772.043
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.975.485.000	535.712.957	6,72	7.439.772.043
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	515.640.000	0	0	515.640.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	515.640.000	0	0	515.640.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	474.840.000	0	0	474.840.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.800.000	0	0	40.800.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	911.397.010	4,85	17.881.527.990
5.1.2.1	Belanja Barang	4.131.272.000	215.342.400	5,21	3.915.929.600
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	4.131.272.000	215.342.400	5,21	3.915.929.600
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300.000.000	24.197.500	8,07	275.802.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.800.000	0	0	6.800.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000	0	0	50.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	357.326.000	50.428.900	14,11	306.897.100
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	335.571.000	19.718.000	5,88	315.853.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.610.000	3.000.000	12,71	20.610.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000	5.717.000	11,43	44.283.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.000.000	0	0	10.000.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.750.000	2.660.000	7,44	33.090.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.000.000	0	0	200.000.000
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.486.975.000	109.621.000	7,37	1.377.354.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	0	0	30.000.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	0	0	45.240.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	8.109.409.000	323.787.010	3,99	7.785.621.990
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	6.943.487.000	313.457.134	4,51	6.630.029.866
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.600.000	28.200.000	7,59	343.400.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.819.570.000	152.915.000	3,17	4.666.655.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	76.620.000	6.385.000	8,33	70.235.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	154.620.000	12.885.000	8,33	141.735.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.650.000	0	0	7.650.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000	27.385.460	10,03	245.614.540
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	548.037.000	49.141.656	8,97	498.895.344
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	34.200.000	2.850.000	8,33	31.350.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.515.000	2.850.000	8,26	31.665.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	119.775.000	3.924.576	3,28	115.850.424
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	20.000.000	594.300	2,97	19.405.700
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	435.000.000	24.826.142	5,71	410.173.858
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.550.000	1.500.000	8,09	17.050.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.350.000	0	0	30.350.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	271.732.000	9.579.876	3,53	262.152.124
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.223.000	8.821.361	8,38	96.401.639
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.116.000	337.120	6,59	4.778.880
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.393.000	421.395	6,59	5.971.605
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	0	0	155.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000	750.000	4,17	17.250.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	0	0	1.500.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	16.500.000	750.000	4,55	15.750.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	77.000.000	0	0	77.000.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000	0	0	475.000.000
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	245.000.000	0	0	245.000.000
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	40.000.000	0	0	40.000.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.000.000	0	0	190.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	285.000.000	0	0	285.000.000
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000	0	0	160.000.000
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	125.000.000	0	0	125.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.190.000	0	0	39.190.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.190.000	0	0	39.190.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	719.650.000	51.444.000	7,15	668.206.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	469.650.000	31.954.000	6,80	437.696.000
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.500.000	5.609.000	33,99	10.891.000
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.700.000	0	0	39.700.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	279.650.000	12.045.000	4,31	267.605.000
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000	0	0	20.000.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.800.000	7.525.000	17,18	36.275.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	70.000.000	6.775.000	9,68	63.225.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	19.490.000	7,80	230.510.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	19.490.000	7,80	230.510.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	5.832.594.000	320.823.600	5,50	5.511.770.400
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.582.594.000	320.823.600	5,75	5.261.770.400
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.582.594.000	320.823.600	5,75	5.261.770.400
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	250.000.000	0	0	250.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.680.000.000	0	0	1.680.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	0	0	27.600.000.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.600.000.000	0	0	27.600.000.000
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	0	0	27.600.000.000
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.600.000.000	0	0	27.600.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.383.450.000	0	0	1.383.450.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.212.000.000	0	0	1.212.000.000
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361.000.000	0	0	361.000.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.000.000	0	0	361.000.000
5.2.2.5.2.1	Belanja Modal Mebel	225.000.000	0	0	225.000.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	136.000.000	0	0	136.000.000
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	497.900.000	0	0	497.900.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	353.100.000	0	0	353.100.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	318.100.000	0	0	318.100.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.2.10.2.4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	35.000.000	0	0	35.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.5.1.1.12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.450.000	0	0	1.450.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	170.000.000	0	0	170.000.000
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	170.000.000	0	0	170.000.000
	Jumlah Belanja	64.246.353.000	1.815.673.385	2,83	62.430.679.615
	Surplus/(Defisit)	0	(1.815.673.385)	100	1.815.673.385
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(1.815.673.385)	100	1.815.673.385

Semarang, 31 Januari 2024
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 64.246.353.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 62.862.903.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.383.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 62.862.903.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.815.673.385,- dengan Presentasi 2.89 %. Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 18.792.925.000,- dan realisasi sebesar Rp. 911.397.010,- dengan Presentasi 4.85%. Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 27.600.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal mengalokasikan sebesar Rp. 1.383.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 1.212.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 1.450.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- dengan Presentasi 0 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Kou (%)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH	64.246.353.000	1.788.815.979	61.572.537.021	2,78
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.971.353.000	1.276.554.653	20.694.798.347	5,81
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.000.000	95.079.374	938.920.626	9,20
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000	84.495.842	515.504.158.00	14,08
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.000.000	10.583.532	423.416.468.00	2,44
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.970.338.000	924.645.907	14.045.692.093	6,18
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.274.338.000	904.276.375	13.370.061.625.00	6,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	605.300.000	7.458.532	597.841.468.00	1,23
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	4.586.000	45.414.000.00	9,17
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-	5.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	25.700.000	8.325.000	17.375.000.00	32,39
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	-	10.000.000.00	-
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	180.000.000	-	180.000.000	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	-	10.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	-	155.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	-	10.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	5.000.000.00	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.240.000	-	185.240.000	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.240.000	-	45.240.000.00	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	-	30.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000	-	30.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	-	50.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	20.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-	10.000.000.00	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.990.000.000	74.005.532	1.915.994.468	3,72
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	5.717.000	44.283.000.00	11,43
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	8.771.500	66.228.500.00	11,70
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	2.660.000	17.340.000.00	13,30
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	24.197.500	275.802.500.00	8,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	7.785.000	17.215.000.00	31,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	1.500.000	18.500.000.00	7,50
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	-	30.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.070.000.000	12.816.000	1.057.184.000.00	1,20
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	3.100.000	96.900.000.00	3,10
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000	7.458.532	292.541.468.00	2,49
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.152.000.000	-	1.152.000.000	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	165.000.000	-	165.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	987.000.000	-	987.000.000.00	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.709.775.000	131.379.840	1.578.395.160	7,68
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.000.000	14.819.012	170.180.988.00	8,01
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.775.000	29.345.018	545.429.982.00	5,11
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.000.000	87.215.810	862.784.190.00	9,18
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000.000	51.444.000	698.556.000	6,86
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	-	50.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000	12.045.000	247.955.000.00	4,63
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-	20.000.000.00	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	6.775.000	63.225.000.00	9,68
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	32.624.000	317.376.000.00	9,32
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000	199.494.334	34.717.505.666	0,57
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	425.000.000	22.777.467	402.222.533	5,36
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	325.000.000	19.049.191	305.950.809.00	5,86
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000.000	3.728.276	96.271.724.00	3,73
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	180.000.000	7.157.302	172.842.698	3,98
	Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarekawan Tanggap Bencana	100.000.000	3.728.276	96.271.724.00	3,73
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	80.000.000	3.429.026	76.570.974.00	4,29

NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	32.162.000.000	113.264.602	32.048.735.398	0,35
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.330.000.000	19.273.216	4.310.726.784,00	0,45
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	27.832.000.000	93.991.386	27.738.008.614,00	0,34
	Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	56.294.963	2.093.705.037	2,62
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.150.000.000	56.294.963	2.093.705.037,00	2,62
III.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000	165.987.367	2.777.012.633	5,64
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	85.000.000	3.312.000	81.688.000	3,90
	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	85.000.000	3.312.000	81.688.000,00	3,90
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.858.000.000	162.675.367	2.695.324.633	5,69
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	270.000.000	14.672.000	255.328.000,00	5,43
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	100.000.000	4.009.017	95.990.983,00	4,01
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.488.000.000	143.994.350	2.344.005.650,00	5,79
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000	8.029.250	1.716.970.750	0,47
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.725.000.000	8.029.250	1.716.970.750	0,47
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.620.000.000	905.000	1.619.095.000,00	0,06
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	105.000.000	7.124.250	97.875.750,00	6,79
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000	19.229.550	380.770.450	4,81
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	400.000.000	19.229.550	380.770.450	4,81
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultansi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	400.000.000	19.229.550	380.770.450,00	4,81
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000	48.071.550	551.928.450	8,01
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	600.000.000	48.071.550	551.928.450	8,01
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	23.611.550	226.388.450,00	9,44
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.000.000	24.460.000	325.540.000,00	6,99
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000	56.846.275	533.153.725	9,63
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintah Daerah Kabupataen/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	590.000.000	56.846.275	533.153.725	9,63
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	163.460.000	24.040.000	139.420.000,00	14,71
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	426.540.000	32.806.275	393.733.725,00	7,69
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000	14.603.000	200.397.000	6,79
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	215.000.000	14.603.000	200.397.000	6,79
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kialifikasi Menengah	215.000.000	14.603.000	200.397.000,00	6,79
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000	26.857.406	858.142.594	3,03
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	885.000.000	26.857.406	858.142.594	3,03
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	215.000.000	3.848.276	211.151.724,00	1,79
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	670.000.000	23.009.130	646.990.870,00	3,43
	JUMLAH	64.246.353.000	1.815.673.385	62.430.679.615	2,83